

Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat

Aksi Kolektif Perempuan dalam Mengadvokasikan Upaya Peningkatan Kesehatan Reproduksi Perempuan

Women's Collective Action in Advocating for Improvements in Women's Reproductive Health

Penulis

Desi Rahmawati dan Nadlirotul Ulfa

Editor dan Pengulas Naskah

Volume Editors and Reviewers

Amalinda Savirani

Rachael Diprose

Annisa Sabrina Hartoto

Ken M.P. Setiawan

Penyunting dan Penerjemah Naskah

Copy Editors

Annisa Sabrina Hartoto

Bronwyn Beech Jones

Untuk merujuk studi kasus ini:

Rahmawati, D., dan Ulfa, N., 2020. Aksi Kolektif Perempuan dalam Mengadvokasikan Upaya Peningkatan Kesehatan Reproduksi Perempuan [Women's Collective Action in Advocating for Improvements in Women's Reproductive Health]. Dalam A. Savirani, R. Diprose, A.S. Hartoto, dan K.M.P. Setiawan [Eds], *Membuka Jalan untuk Pembangunan Inklusif Gender di Daerah Perdesaan Indonesia: Bunga Rampai Kajian Aksi Kolektif Perempuan dan Pengaruhnya pada Pelaksanaan Undang-undang Desa [Forging Pathways for Gender-inclusive Development in Rural Indonesia: Case Studies of Women's Collective Action and Influence on Village Law Implementation]*. The University of Melbourne, Universitas Gadjah Mada dan MAMPU: Jakarta, hal. 237-266. <https://doi.org/10.46580/124328>. Tersedia di: www.mampu.or.id dan www.demisetara.org.

Penelitian ini didukung oleh Pemerintah Australia dan Indonesia, dan dilakukan melalui konsultasi dengan organisasi masyarakat sipil yang terlibat. Kami menghaturkan terima kasih kepada organisasi-organisasi ini, dan Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU) atas dukungan mereka, serta kepada para partisipan penelitian, terutama para perempuan desa yang telah membagikan pengalaman dan pandangan mereka dengan kami. Isi dari publikasi ini merupakan hasil analisis dan pandangan para penulis, dan belum tentu merefleksikan pandangan dari pemerintah dan organisasi yang terlibat. Isi dari studi kasus ini di masa depan dapat diubah untuk merefleksikan lebih jauh hasil dan analisis penelitian seiring waktu berjalan. Untuk analisis yang lebih menyeluruh dan komparatif dari semua studi kasus, lihat Diprose, R., Savirani, A., Setiawan, K.M.P., dan Francis, N., 2020. Aksi Kolektif Perempuan dan Pelaksanaan Undang-Undang Desa: Upaya Perempuan dalam Menggerakkan Perubahan dan Memengaruhi Pembangunan Inklusif Gender di Daerah Perdesaan Indonesia. The University of Melbourne, Universitas Gadjah Mada, dan MAMPU. <https://doi.org/10.46580/124327>. Tersedia di: www.mampu.or.id dan www.demisetara.org.

To cite this case study:

Rahmawati, D., and Ulfa, N., 2020. Aksi Kolektif Perempuan dalam Mengadvokasikan Upaya Peningkatan Kesehatan Reproduksi Perempuan [Women's Collective Action in Advocating for Improvements in Women's Reproductive Health]. In A. Savirani, R. Diprose, A.S. Hartoto, and K.M.P. Setiawan [Eds], *Membuka Jalan untuk Pembangunan Inklusif Gender di Daerah Perdesaan Indonesia: Bunga Rampai Kajian Aksi Kolektif Perempuan dan Pengaruhnya pada Pelaksanaan Undang-undang Desa [Forging Pathways for Gender-inclusive Development in Rural Indonesia: Case Studies of Women's Collective Action and Influence on Village Law Implementation]*. The University of Melbourne, Universitas Gadjah Mada and MAMPU: Jakarta, pp. 237-266. <https://doi.org/10.46580/124328>. Available at: www.mampu.or.id and www.demisetara.org.

This research was supported by the Governments of Australia and Indonesia, and was conducted in consultation with the civil society organisations involved. We would like to thank these organisations and the Australia-Indonesia Partnership for Women's Empowerment and Gender Equality (MAMPU) for their support, as well as all participants in the research, in particular the countless village women who shared their experiences and views with us. The views expressed in the analysis are those of the authors alone and do not necessarily reflect the views of the supporting governments or organisations. Future iterations of this case study might reflect further research and analysis over time. For a more extensive and comparative analysis of the case studies, see Diprose, R., Savirani, A., Setiawan, K.M.P., and Francis, N., 2020. Women's Collective Action and the Village Law: How Women are Driving Change and Shaping Pathways for Gender-inclusive Development in Rural Indonesia. The University of Melbourne, Universitas Gadjah Mada, and MAMPU. <https://doi.org/10.46580/124326>. Available at: www.mampu.or.id and www.demisetara.org.

Ucapan Terima Kasih

Tim editor ingin mengucapkan terima kasih kepada semua anggota tim peneliti lapangan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, atas kerja keras dan dedikasi mereka dalam penelitian dan penulisan studi kasus mengenai aksi kolektif perempuan dan Dana Desa di Indonesia ini: Anastasia Imelda Cahyaningrum, Azifah R. Astrina, Bellicia Angelica Tanvil, Desi Rahmawati, Devy Dhian Cahyati, Galih Prabaningrum, Hening Wikan Sawiji, Indah Surya Wardhani, Longgina Novadona Bayo, Mustaghfiroh Rahayu, Nadlirotul Ulfa, Norin Mustika Rahadiri Abheseka, Smita Tanaya, Ulya Niemi Efrina Jamson, dan Wigke Capri.

Volume studi kasus ini terwujud melalui kerja LSM-LSM yang terlibat yang berkomitmen penuh untuk mendukung dan membimbing perempuan di desa di seluruh Indonesia. Setiap hari para kader, staf, dan pendamping lapangan bergerak bahu membahu bersama perempuan desa untuk memperjuangkan kesetaraan hak perempuan serta membentuk kebijakan, inisiatif, dan pendekatan untuk pemberdayaan perempuan. Para editor dan penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua staf organisasi atas partisipasi mereka dalam workshop perencanaan dan analisis kolaboratif yang diselenggarakan dalam proses penelitian ini, dukungan yang diberikan selama penelitian di lapangan, beserta waktu yang mereka sediakan untuk wawancara. Kami sangat menghargai kolaborasi yang terbentuk dengan organisasi di level nasional: 'Aisyiyah, Bina Keterampilan Pedesaan Indonesia (BITRA), Forum Pengada Layanan (FPL), Institut KAPAL Perempuan, Migrant CARE, Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), PERMAMPU, Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), dan Yayasan Annisa Swasti (Yasanti) serta mitra subnasional mereka — Yayasan Kajian dan Pemberdayaan Masyarakat (YKPM, mitra lokal KAPAL Perempuan di Pangkajene dan Kepulauan), Yayasan Amnaut Bife Kuan (YABIKU, mitra FPL di NTT), DAMAR Lampung (mitra PERMAMPU di Lampung), Serikat Perempuan Independen (SPI) Labuhan Batu (mitra FPL di Labuhan Batu, Sumatera Utara), Perkumpulan Panca Karsa di Mataram (PPK, mitra Migrant CARE di Lombok Tengah, NTB), dan Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan (KPS2K, mitra KAPAL Perempuan di Jawa Timur).

Apresiasi juga kami sampaikan kepada Astutik Supraptini dan Stewart Norup, yang telah memberikan masukan dan saran yang berharga terkait penyusunan dokumen ini, dan juga kepada segenap tim MAMPU atas dukungan yang diberikan selama proses penelitian dan diseminasi hasilnya, terutama Amron Hamdi, Dhina M. Kartikasari, Atik Dewi, Deasy Widjajanti, Arsi Nurwaskito, Krisdeny Mahajaya dan Kate Shanahan.

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya juga kami haturkan kepada semua partisipan dalam penelitian ini, yang tersebar di 9 provinsi di Indonesia. Pandangan, pengetahuan dan pengalaman semua perempuan yang berada di dalam bunga rampai ini kami harapkan dapat terus memberikan pelajaran dan inspirasi bagi upaya pemberdayaan perempuan di Indonesia.

Ringkasan

Studi kasus ini mengeksplorasi tentang bagaimana perempuan di desa penelitian di Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon telah mengambil peran aktif dalam proses kebijakan di tingkat desa. Hal ini diawali dari keterlibatan mereka dalam kegiatan-kegiatan yang diinisiasi oleh Pimpinan Daerah (PD) 'Aisyiyah Kabupaten Cirebon dalam isu kekurangan gizi kronis pada anak (*stunting*) dan isu kesehatan reproduksi perempuan. Desa di Kecamatan Talun ini memang memiliki permasalahan yang cukup mendesak dalam isu kesehatan reproduksi. Hasil pendataan para Kader Kesehatan Reproduksi Balai Sakinah 'Aisyiyah (Kader Kespro BSA) menunjukkan bahwa tidak sedikit perempuan desa memiliki masalah kesehatan pada organ reproduksi mereka, termasuk tumor dan kanker. Pada sisi lain, rata-rata perempuan di desa ini memiliki tingkat pendidikan formal yang rendah, kemampuan ekonomi yang lemah, dan pasif dari aktivitas publik. Hal ini menyebabkan mereka belum terpapar dengan informasi tentang kesehatan reproduksi. Keterbatasan infrastruktur berupa pasokan air bersih dan listrik juga berpengaruh pada kualitas kesehatan warga desa pada umumnya.

Langkah awal PD 'Aisyiyah dalam mendukung aksi kolektif perempuan di desa serta menumbuhkan kesadaran mengenai kesehatan reproduksi perempuan diawali dengan pembentukan kelompok-kelompok perempuan di bawah naungan Balai Sakinah 'Aisyiyah Qoryah Thayyibbah (BSA). BSA adalah forum bagi perempuan desa berusia subur (15 – 49 tahun) dan berasal dari kalangan ekonomi lemah untuk menumbuhkan kesadaran mengenai hak kesehatan reproduksi perempuan secara khusus maupun aspek-aspek yang melekat termasuk Keluarga Berencana (KB) dan ketahanan keluarga. Dari sini muncullah kader-kader perempuan, berupa kelompok kecil perempuan desa yakni Kader Kespro BSA, yang kemudian membagi informasi dan keterampilan yang mereka miliki kepada kelompok yang lebih besar yaitu BSA secara umum. Proses edukasi yang dilakukan Kader Kespro BSA, dengan dukungan PD 'Aisyiyah, memberikan kesempatan bagi perempuan desa untuk mendapatkan pelatihan kepemimpinan dan berorganisasi, kemampuan berbicara di depan publik, serta peningkatan pemahaman mengenai isu kesehatan reproduksi perempuan. Berbekal peningkatan kemampuan ini, kader-kader BSA berperan sebagai agen perubahan yang berhasil menularkan pengetahuannya kepada sesama perempuan desa. Kader-kader ini juga berperan penting dalam mengkonsolidasikan dukungan dari sesama perempuan desa, tidak hanya dalam wadah Balai Sakinah 'Aisyiyah (BSA), namun juga melalui Kelompok Wanita Tani (KWT) MAMPU 'Aisyiyah. Kelompok KWT adalah wadah bagi perempuan desa untuk mengkonsolidasikan diri melalui aktivitas pendukung yaitu penyediaan kebun gizi, pelatihan pertanian, serta peningkatan akses peningkatan pendapatan bagi perempuan miskin di desa. Melalui partisipasi dan aksi kolektif menggunakan aktivitas yang melekat pada keseharian perempuan desa, yaitu bertani, KWT diharapkan dapat memperluas jalan pencapaian agenda kolektif, yaitu peningkatan pemahaman perempuan terkait kesehatan reproduksi.

Keberadaan kelompok-kelompok ini tidak hanya mendukung peningkatan pengetahuan dan keahlian perempuan, namun juga memperkuat dan mendiversifikasi jaringan yang dimiliki oleh perempuan, dengan sesama perempuan lain, dengan aktor kunci pemerintah desa dan kabupaten, serta tokoh agama di desa. Advokasi, pendampingan, penguatan kapasitas serta pengembangan jaringan perempuan di desa ini membuahkan hasil yang signifikan. *Pertama*, aksi kolektif perempuan berkontribusi langsung terhadap penerbitan peraturan desa (perdes) tentang kesehatan reproduksi perempuan, yaitu Perdes Nomor 07 tahun 2017 tentang Pengelolaan Kesehatan Reproduksi Perempuan. Perdes ini juga menjadi dasar untuk penganggaran Alokasi Dana Desa untuk agenda kesehatan reproduksi perempuan. *Kedua*, melalui KWT mereka mengusulkan melalui musyawarah desa untuk penambahan lahan kebun gizi ke lahan yang lebih strategis dan subur. *Ketiga*, perempuan desa berhasil mengubah waktu pelaksanaan musyawarah desa yang lebih akomodatif terhadap partisipasi perempuan, yakni hari Minggu sore. Perubahan waktu ini mendorong perempuan desa agar semakin terlibat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa guna mengadvokasikan kebutuhan-kebutuhan perempuan.

Namun demikian, perubahan yang terjadi masih bersifat inkremental, sehingga kemampuan berkonsolidasi dan melakukan aksi kolektif para perempuan di desa ini masih memerlukan dukungan tertentu dari PD 'Aisyiyah sebagai pendamping serta pemerintah desa demi memajukan agenda kesehatan reproduksi perempuan. Dalam konteks yang demikian, strategi pendekatan kepada aktor pemerintahan yang melekat dalam strategi PD 'Aisyiyah menemukan relevansinya. Pemanfaatan jaringan sosial yang sebelumnya sudah terjalin di desa dapat menjadi bekal untuk meneruskan advokasi di desa. Pendekatan kepada aktor yang mewakili institusi pemerintahan memberikan dukungan tersendiri untuk menyediakan payung kebijakan untuk agenda kesehatan reproduksi perempuan yang berkesinambungan secara jangka panjang.

Summary

This case study focuses on how women in the Cirebon research village in West Java have played an active role in village policy making processes. These women leaders first participated in regional 'Aisyiyah leaders (PD) programs to raise awareness on women's reproductive health which is a pressing issue in the research village.

Data collected by 'Aisyiyah reproductive health cadres portrayed the considerable number of women who have experienced health conditions and diseases affecting the reproductive system, including tumours and cancer. The village's limited access to clean water and reliable electricity has also affected the health outcomes of villagers. Women in the Cirebon research village have also faced challenges due to low levels of education, limited economic capacity, and restricted involvement in public life.

An initial step for 'Aisyiyah to support women's collective action and to increase their awareness about sexual and reproductive health issues was to form a new women's group, the Balai Sakinah 'Aisyiyah Qoryah Thayyibbah (BSA). The BSA group is a forum for village women of childbearing age (defined as 15 – 49 years old) from disadvantaged backgrounds to learn about women's reproductive health rights and family planning. From the BSA, a group of 'Aisyiyah reproductive health cadres emerged to share information and skills with the other BSA cadres. 'Aisyiyah reproductive health cadres have run education programs with assistance from 'Aisyiyah at the regional level. These education programs have provided opportunities for women to improve their leadership and organisational skills, public speaking, and understanding of reproductive health issues. With their improved skills, these women have acted as agents of change by sharing their knowledge with other village women. These cadres also played an important role in forming the MAMPU 'Aisyiyah Women Farmers Group (KWT), which has strengthened this support network. The KWT group has focused primarily on maintaining a "nutrition garden" (*kebun gizi*), providing agricultural training, and creating livelihood opportunities for poor women in the village. This KWT group also has played an important role in ensuring women's collective action and participation through regular farming activities. The ongoing presence of KWT is hoped to provide another space in the village to further women's understanding of reproductive health.

The formation of these women groups has not only enhanced women's skills and knowledge, but also strengthened and diversified women's networks with other village women, key government actors at the village and district levels, as well as with religious figures. Women's advocacy, skills and knowledge enhancement, group support, and strengthened and diversified networks have led to significant change. *First*, women's collective action directly shaped the content and enactment of the 2017 Village Regulation on Women's Reproductive Health. This Village Regulation has provided the basis for Village Fund allocations for women's reproductive health. *Second*, through the KWT, women successfully proposed shifting the "nutrition garden" (*kebun gizi*) to a more strategic and fertile location in a village planning meeting. *Third*, their advocacy also resulted in changing Village Consultation and Deliberation Meetings (*musyawarah desa – MusDes*) to a time when women could attend on Sunday afternoons, so they could become more involved in policy-making processes at the village level.

Women in the Cirebon research village have increasingly advocated for women's needs in village development planning meetings. Yet, change is incremental, and at the time of the research, women's ability to consolidate these collective action efforts still relied to a degree upon the support and guidance of regional 'Aisyiyah leaders and the receptiveness of the village government to advance women's health policies. In this context, the use of existing social networks may help to facilitate ongoing advocacy in the village. Equally, 'Aisyiyah's regional leaders' strategy of approaching key government actors has been especially important as their support provided a basis for policy action to advance women's reproductive health agenda over the long term.

Pendahuluan

Studi kasus ini menguraikan tentang aksi kolektif perempuan di desa penelitian di Kabupaten Cirebon terkait permasalahan seputar kesehatan reproduksi perempuan.¹ Desa ini memiliki persoalan kesehatan reproduksi yang cukup serius, di mana sejumlah warga menderita tumor dan kanker organ reproduksi, yang kemudian menambah daftar panjang penyakit yang diderita masyarakat desa. Rendahnya kesadaran dan pengetahuan mengenai pentingnya kesehatan reproduksi perempuan juga dipersulit oleh tingginya tingkat kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, serta norma sosial yang menempatkan perempuan sebagai objek struktur kuasa di ranah domestik. Selain itu, permasalahan kesehatan juga diperburuk dengan adanya keterbatasan akses warga terhadap sumber air bersih.

Studi kasus ini akan mengeksplorasi tentang bagaimana kelompok-kelompok perempuan, yang didukung oleh Pimpinan Daerah (PD) 'Aisyiyah Kabupaten Cirebon, menghadirkan pengaruh yang kuat di desa hingga lahirnya peraturan desa tentang kesehatan reproduksi perempuan. Sejak kehadirannya di desa ini pada tahun 2014, PD 'Aisyiyah Kabupaten Cirebon telah melakukan serangkaian proses pendampingan yang menguatkan perempuan desa. Hal ini dilakukan antara lain melalui: (1) pembentukan kelompok-kelompok perempuan; (2) mendorong penerbitan perdes kesehatan reproduksi dengan menginisiasi isu dan menyelenggarakan pelatihan penyusunan perdes; (3) pembentukan Kelompok Wanita Tani (KWT); dan (4) mengkondisikan Musyawarah Desa (Musdes) agar memberikan peluang bagi perempuan desa dapat berpartisipasi dalam rapat publik.

Kegiatan pertama, yaitu pembentukan kelompok perempuan, merupakan langkah awal untuk mengkonsolidasikan dan memberdayakan perempuan desa, serta untuk memperkuat basis gerakan di akar rumput, sedangkan upaya penerbitan perdes merupakan target inti dari upaya untuk memengaruhi kebijakan pada level desa. Adapun pembentukan KWT dan pengkondisian Musdes adalah langkah untuk memastikan perempuan desa dapat memanfaatkan peluang kebijakan (perdes). Keempat hal tersebut menjadi rangkaian penting bagaimana aksi kolektif perempuan desa membawa perubahan yang signifikan terkait hak kesehatan reproduksi perempuan.

Pertama-tama, tulisan ini mendeskripsikan kondisi sosial dan ekonomi desa yang melatarbelakangi permasalahan yang terjadi di desa, serta memaparkan situasi sosial dan politik yang berpengaruh terhadap aksi kolektif perempuan desa. Bagian kedua menguraikan pembentukan kelompok-kelompok perempuan di desa sebagai bagian dari ranting organisasi PD 'Aisyiyah di tingkat desa. Bagian ketiga menceritakan aksi kolektif perempuan yang terjadi, dimulai dari keterlibatan perempuan dalam perumusan peraturan desa, partisipasi mereka dalam Kelompok Wanita Tani, kemudian keikutsertaan mereka di dalam Musrenbang. Bagian keempat, mengelaborasi upaya pendekatan dan pendampingan yang dilakukan oleh PD Aisyiyah dalam menguatkan aksi kolektif perempuan. Bagian kelima menjelaskan tantangan ke depan bagi kelompok perempuan di desa serta bagi PD 'Aisyiyah, dan bagaimana masing-masing pihak menyikapi tantangan tersebut. Bagian penutup merangkum strategi, perubahan, serta kebutuhan tindak lanjut dari penguatan aksi kolektif perempuan ini.

1. Kondisi Sosial Ekonomi Desa

Desa di Kecamatan Talun yang menjadi fokus penelitian ini memiliki keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas, namun belum pernah mendapatkan kesempatan menerima pendampingan intens dari pemerintah maupun LSM lain. Terlebih lagi, desa ini belum pernah menjadi desa sasaran pendampingan pemerintah dan PKK kabupaten, walaupun desa ini secara umum mengindikasikan ketertinggalan.²

¹ Semua nama yang digunakan di dalam studi kasus ini telah disamarkan dan bukan nama sebenarnya.

² Keterangan Kepala Bidang Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (DP2KBP3A), FGD tanggal 20 Februari 2019. Juga, pernyataan Kepala

Ketertinggalan yang dimaksud adalah dari sisi tingkat pendidikan masyarakat dan kemiskinan yang berkontribusi terhadap rendahnya kesadaran tentang kesehatan reproduksi perempuan. Data statistik memperlihatkan bahwa sekitar 30 persen kepala keluarga tidak menamatkan Sekolah Dasar/SD (BPS, 2014b). Lebih dari 40 persen rumah tangga juga masih tergolong sebagai keluarga miskin dan rentan miskin (BPS, 2014a). Situasi tersebut diperburuk dengan adanya keterbatasan akses terhadap sumber air bersih sehingga warga desa lazim melakukan aktivitas Mandi, Cuci, Kakus (MCK) di sungai, termasuk perempuan-perempuan yang baru saja melahirkan. Mereka beraktivitas di sungai tanpa khawatir pada ancaman infeksi pada organ reproduksinya yang belum pulih. Seorang mantan bidan desa mendeskripsikan tentang tantangan memberikan edukasi untuk mengubah perilaku tersebut.

“Kaum perempuannya bisa bersalin langsung turun ke kali [sungai] untuk membersihkan dirinya. Memang sudah ada perubahan, tapi karena susah air di sana [maka] masih menggunakan kali [untuk mandi, cuci, kakus/MCK].” (Nimas, mantan bidan desa, desa penelitian di Cirebon, 23 Februari 2019).

Tantangan edukasi ini diperberat dengan kecenderungan kuatnya nilai-nilai yang menempatkan perempuan sebagai objek dari struktur kuasa desa dan perannya terbatas di ranah domestik. Secara kultural, perempuan desa tunduk pada keputusan orang tua dan suami, termasuk keputusan-keputusan yang menyangkut kesehatan reproduksinya dan pengasuhan anak. Kepatuhan ini termasuk izin untuk menggunakan kontrasepsi, jenis kontrasepsi (program KB), metode melahirkan, pemberian ASI eksklusif, imunisasi, dan hal-hal lain yang lekat dengan kebutuhan kesehatan perempuan.³ Kepatuhan ini tidak semata karena alasan kultur tetapi juga merupakan efek lanjutan dari minimnya pendidikan yang dimiliki para perempuan, perkawinan anak, dan ketergantungan ekonomi baik kepada orang tua, mertua, atau bahkan suami. Situasi ini menempatkan para pihak tersebut memegang kendali atas setiap keputusan dalam rumah tangga, yang berdampak pada perempuan. Situasi-situasi ini pada gilirannya menjadikan perempuan menghadapi hambatan termasuk untuk memahami hak reproduksinya, dan untuk berkiprah di ruang publik.⁴

Ketertinggalan pola pikir dan kualitas sumber daya manusia di atas sangat mungkin juga berkaitan dengan ketertinggalan pembangunan. Desa yang hanya berjarak sekitar 2 Km dari pusat kecamatan dan sekitar 5 Km dari ibu kota kabupaten ini baru memiliki akses jalan memadam yang membuka isolasi sekitar sepuluh tahun terakhir (LKPPD, 2018). Keterlambatan ini menyebabkan pentingnya pendekatan yang sangat intens untuk dapat mengubah kesadaran mereka:

“Daerah yang sangat primitif. Primitif banget di sana itu. Sangat signifikan [pentingnya pendekatan yang intens ke masyarakat]. Kalau kita ambil [contoh], di sana itu asal kita jangan pelit omongan. Di mana kita berada [harus selalu] omongin, omongin, omongin, sekaku apapun. Karena perempuan di sana itu kan rata-rata lulus SD sudah bagus. Dari sekian jumlah penduduk...baru lima tahun terakhir ada [yang] memikirkan tentang sekolah SMA.” (Nimas, mantan bidan desa, desa penelitian di Cirebon, 23 Februari 2019).

Di luar tantangan-tantangan tersebut, desa studi kasus ini menawarkan situasi politik yang kondusif. Hal ini karena dalam satu dekade terakhir kepala desa (*kuwu*) yang memimpin sangat terbuka pada setiap kesempatan perubahan. Sebelum kehadiran PD ‘Aisyiyah, kepala desa pernah menerima kehadiran LKNU dan USAID yang juga menggarap isu kesehatan walaupun tidak melakukan pemberdayaan perempuan.⁵ Ia beralasan bahwa hal ini demi kemajuan desanya. Kalau organisasi yang hadir berpotensi menghadirkan

Bidang Sosial Budaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), 19 Februari 2019. Hal serupa dinyatakan kembali pada pertemuan dengan Ketua PKK Kabupaten, 6 Maret 2019.

³ Wawancara dengan Nimas, mantan bidan desa, 25 Februari 2019. Juga, wawancara dengan Senior Koordinator Program MAMPU ‘Aisyiyah Cirebon, 18 Februari 2019.

⁴ Wawancara dengan Nimas, mantan bidan desa, 25 Februari 2019.

⁵ Sekitar tahun 2014. Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU) dan USAID meliput aktivitas puskesmas untuk mengatasi masalah tuberkulosis di desa. Dalam kesempatan tersebut seorang kader perempuan—kemudian menjadi Kader ‘Aisyiyah—tampil sebagai kader yang bekerja aktif mendeteksi persoalan tuberkulosis di desa.

kegelisahan di masyarakat, ia bersedia menjembatani hal itu selama yakin bahwa tawaran aktivitas berpotensi menghadirkan kemajuan untuk desa. Kepala desa menyatakan:

“Jangan sampai saya disalahkan di masyarakat, [bahwa] munculnya ‘Aisyiyah karena ada syiar agama, misalnya. Masyarakat kita NU. Misalnya, nah ‘Aisyiyah kena omongan, saya pantau eh ternyata bener nggak ada...Sebut lah, terserah itu mah, rekrut apa, yang penting itu dalamnya demi perkembangan kemajuan di desa kami, nah makanya saya terima... [Warga] sempat menanyakan itu [‘Aisyiyah] kenapa? Ya makanya saya kasih penjelasan, jangan lihat bungkusnya. Daripada nama lembaganya bagus tapi nyatanya pelatihannya jelek ya buat apa.” (Kepala Desa, desa penelitian di Cirebon, 25 Februari 2019).

Kekhawatiran tersebut tidak berlebihan mengingat masyarakat di Kecamatan Talun sebagian besar beragama Islam dan secara kultural berafiliasi pada ormas Nahdlatul Ulama (NU). Bagi masyarakat desa, kehadiran organisasi masyarakat sipil yang berasal dari ormas keagamaan yang lain berpotensi menghadirkan kegelisahan. Kekhawatiran ini terutama berkaitan dengan aktivitas keagamaan yang berbeda secara tradisi dan pandangan.⁶ Dalam konteks inilah, kekuasaan desa yang terpusat pada satu figur, yaitu kepala desa berperan penting bagi langkah PD ‘Aisyiyah melakukan advokasi kesehatan reproduksi perempuan. Kepala desa menjadi penjamin langkah ‘Aisyiyah di desa, karenanya strategi untuk menjalin komunikasi yang intens dengan kepala desa menjadi semakin penting.

2. Pembentukan Kelompok-Kelompok Perempuan

Langkah PD ‘Aisyiyah dalam menumbuhkan kesadaran perempuan desa mengenai hak kesehatan reproduksi perempuan diawali dengan pembentukan Balai Sakinah ‘Aisyiyah Qoryah Thayyibbah (BSA-QT atau selanjutnya disebut sebagai BSA). Dalam konteks Cirebon, pembentukan wadah bagi perempuan desa dari kelompok ekonomi lemah ini diawali dengan pembentukan kelompok kecil yang berfungsi sebagai garda depan untuk edukasi dan advokasi kesehatan reproduksi. Untuk memudahkan penyebutan dalam tulisan ini, kelompok dimaksud disebut sebagai Kader Kesehatan Reproduksi atau Kader Kespro BSA. Sedangkan sebutan Kader BSA adalah istilah secara umum, termasuk kelompok kecil ini.

Pembentukan kelompok perempuan desa juga diawali dengan dua agenda. Pertama PD ‘Aisyiyah melakukan advokasi dan kegiatan pelayanan kesehatan sebagai pintu masuk penguatan aksi perempuan. Kedua, sebagai organisasi dengan karakter vertikal multi-tingkat, PD ‘Aisyiyah juga mendirikan struktur kepengurusan organisasi di desa, yaitu ranting. Dalam format organisasi ‘Aisyiyah pembentukan ranting merupakan upaya untuk memperkuat gerakan akar rumput. Hal ini merupakan kunci bagi keberlanjutan gerakan perempuan di desa dengan atau tanpa dukungan dari lembaga donor. Keberadaan BSA dan ranting pada akhirnya menjadi kunci bagi konsolidasi bentuk-bentuk kegiatan perempuan lainnya, termasuk Kelompok Wanita Tani.

Advokasi Pelayanan Kesehatan

Agenda advokasi pemberdayaan perempuan PD ‘Aisyiyah diawali dengan peningkatan pelayanan pondok bersalin desa atau Polindes. Polindes ini adalah salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan ibu dan anak, termasuk untuk kebutuhan KB. Di tahun 2014, PD ‘Aisyiyah berupaya untuk menjembatani komunikasi antara Puskesmas dengan kepala desa untuk mengoptimalkan layanan Polindes. Mereka juga mendampingi Polindes menyusun proposal pengajuan pengadaan perlengkapan sebesar Rp65 juta kepada desa. Hasil advokasi ini adalah pemerintah desa memberikan komitmennya untuk memfasilitasi Polindes secara bertahap dengan menyediakan perlengkapan kesehatan yang diajukan di dalam proposal, seperti meja, kursi, tempat tidur pasien, dan lainnya. Puskesmas pun meneruskan komitmen membiayai bidan desa, menyediakan obat-obatan, dan meningkatkan layanan Polindes dengan menambah hari operasional dari dua hari menjadi lima hari dalam sepekan.⁷

⁶ Keterangan dari Kepala Desa, 25 Februari 2019.

⁷ Wawancara dengan Koordinator Senior Program MAMPU ‘Aisyiyah Kabupaten Cirebon, November 2019 di Yogyakarta.

Pada level yang berbeda, PD 'Aisyiyah memfasilitasi pembentukan Tim Paliatif Care, yaitu tim untuk mendukung perawatan penduduk dengan sakit parah seperti kanker, dan juga penduduk usia lanjut. Hal ini dilakukan dengan melakukan lobi kebijakan kepada Puskesmas, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa. Tahun 2018 Pemerintah Kecamatan Talun mengesahkan tim ini dengan menempatkan Camat sebagai penanggung jawab dan Puskesmas sebagai fasilitatornya. Meskipun pada 2019 masih dalam tahap proses administrasi pada tingkat desa, komitmen pemerintah desa kuat dalam mendukung keaktifan kader kesehatan reproduksi 'Aisyiyah. Sebagai contoh, kader 'Aisyiyah sejak saat itu bisa mengakses layanan mobil SIAGA⁸ untuk mengantarkan penduduk yang sakit mencari pengobatan ke Puskesmas dan rumah sakit.⁹

Pembentukan Balai Sakinah 'Aisyiyah Qoryah Thayyibbah (BSA)

BSA adalah forum yang dibentuk oleh PD 'Aisyiyah dengan beranggotakan perempuan berusia usia subur dari kalangan ekonomi miskin (PP 'Aisyiyah, 2014). Dalam jangka panjang anggota BSA diharapkan dapat menjadi agen perubahan, karena itulah mereka disebut sebagai Kader BSA.¹⁰ Sebagai strategi untuk mengefektifkan agenda ini PD 'Aisyiyah pada 2014 merekrut sekelompok kecil perempuan desa sebagai relawan Kader Kesehatan Reproduksi (Kader Kespro BSA). Jumlah total mereka adalah dua belas orang, terdiri atas dua orang dari setiap dusun, beserta dua orang lainnya yang sebelumnya dikenal sebagai motivator atau koordinator kader.

Rekrutmen Kader Kespro BSA melibatkan Kepala Desa. Hal ini dilakukan tidak semata untuk mendapatkan penerimaan secara sosial dan politik, tetapi juga demi mendapatkan kader-kader terbaik. Sayangnya, ketersediaan sumber daya manusia yang ada di desa belum memenuhi ekspektasi tersebut. Walaupun seluruh perempuan yang direkomendasikan oleh kepala desa telah berpengalaman sebagai Kader PKK dan Posyandu, tetapi mereka sangat pemalu dan belum pernah mendapatkan edukasi sebagai kader sebelumnya, termasuk satu orang yang juga aktif sebagai Kader Puskesmas. Dari sisi latar belakang pendidikan formal sebagian besar dari mereka merupakan lulusan SD. Hanya terdapat satu orang yang berpendidikan setara Diploma 1, satu orang tamatan SMA, serta satu orang tamatan SMP. Hal ini berimplikasi pada kepercayaan diri yang rendah sebagaimana diceritakan sebagai berikut:

"Memang dari awal mah itu yang kita minta kader terbaik di desa tersebut. [Tapi] nggak semuanya mampu untuk menyampaikan materi tersebut. Masih pada takut-takut, masih ini, "ayo gak papa belajar" gitu kan. Terus, "gak usah malu", kan. Pada ketawa, pada rame gitu kan." (Koordinator senior program MAMPU 'Aisyiyah, Cirebon, 21 Februari 2019).

Karena itu edukasi untuk Kader Kespro BSA berjalan beriringan dengan pemberdayaan Kader BSA. Pelatihan untuk mereka diadakan beberapa bulan sebelum mereka mendapatkan tugas merekrut Kader BSA. Dalam pelatihan ini mereka mendapatkan materi tentang kesehatan reproduksi perempuan sebagaimana Kader BSA, namun dengan penekanan pada aspek kepemimpinan dan kemampuan berbicara di depan umum. Pelatihan untuk mereka juga berjalan seiring dengan tugas yang mereka emban. Sepuluh orang Kader Kespro BSA mendapatkan tugas merekrut Kader BSA. Sementara itu dua orang kader lainnya (sebelumnya dikenal sebagai motivator/koordinator kader) bertugas mengkoordinasikan dan memastikan agenda kegiatan di antara mereka. Dalam tugas ini Kader Kespro BSA berhasil merekrut 120 perempuan usia subur dari golongan ekonomi lemah untuk menjadi Kader BSA. Mereka berasal dari seluruh dusun (lima dusun) di desa. Dengan demikian, terdapat 24 orang Kader BSA pada setiap dusun. Edukasi untuk mereka dilakukan melalui pertemuan kelompok-kelompok kecil tiap dusun yang masing-masing difasilitasi oleh Kader Kespro BSA.

⁸ Program Siaga (akronim dari Siap, Antar, Jaga) pada awalnya merupakan program pemerintah untuk mendorong kesiagaan keluarga dan desa dalam mendukung perempuan yang akan melahirkan memperoleh kemudahan mengunjungi fasilitas kesehatan terdekat.

⁹ Wawancara dengan Ibu Srikandi di desa, Februari 2019.

¹⁰ Perbincangan dengan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, Oktober 2019.

Pembekalan pengetahuan untuk Kader Kespro BSA berjalan bersamaan dengan praktik melakukan pendataan penduduk miskin, merekrut anggota BSA, koordinasi untuk setiap kegiatan, serta pembelajaran melalui forum-forum kesehatan di desa yang diinisiasi oleh PD 'Aisyiyah dengan Dinas Kesehatan (Puskesmas) dan pemerintah desa. Kolaborasi tersebut juga memberikan kesempatan kepada Kader Kespro BSA terlibat sebagai enumerator Survei Mawas Diri (SMD) yang merupakan program dari Kementerian Kesehatan melalui Puskesmas (lihat Permenkes RI No 44 tahun 2016). Hasil SMD merupakan input penting bagi perumusan kebijakan Puskesmas di desa.¹¹

Mereka juga berkesempatan untuk terlibat dalam forum-forum kesehatan di balai desa yang diselenggarakan atas kerjasama antara PD 'Aisyiyah dengan Puskesmas dan pemerintah desa. Hal itu meliputi program-program pendukung seperti: sesi pertemuan untuk para suami dan ibu/mertua dari Kader BSA guna menyelaraskan pemahaman tentang hak kesehatan reproduksi perempuan, menyisipkan wacana isu kesehatan dari sudut pandang agama, memfasilitasi sesi diskusi mengenai kontrasepsi untuk para suami dari Kader BSA demi meringankan potensi permasalahan reproduksi perempuan. Hal ini juga didukung dengan advokasi bagi mereka untuk mendapatkan akses terhadap kebijakan-kebijakan kesejahteraan dari pemerintah seperti akses terhadap peralatan penunjang pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah desa, program renovasi rumah, serta memastikan mereka masuk dalam daftar penerima jaminan kesehatan negara yang dibayarkan oleh pemerintah (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional/ PBI JKN).¹²

Di tengah tantangan sumber daya manusia, BSA berhasil menaikkan kapasitas kadernya. Pada tahun 2017 dan 2018 dua orang dari Kader BSA yang telah dianggap mampu beralih menjadi Kader Kespro BSA.¹³ Sementara itu tiga orang Kader Kespro BSA menunjukkan capaian pengembangan diri pada tahun 2019 atau lima tahun setelah MAMPU hadir. Di antaranya, Ibu Srikandi yang semakin percaya diri dan aktif menjalankan perannya sebagai kader kesehatan reproduksi. Peran yang dijalankannya termasuk melakukan edukasi mengenai kesehatan reproduksi, merekrut kader BSA, serta mengkoordinir pertemuan BSA. Ia berhasil menjalankan perannya berbekal pengalaman sebagai Kader Posyandu, Kader Puskesmas, serta sebagai anggota aktif PKK. Ia juga pernah terlibat sebagai Kader Tuberkulosis (TB) Puskesmas. Aktivitas dan komitmen beliau sebagai Kader Posyandu dan Puskesmas membuat beliau menjadi sosok yang dipercaya, baik oleh warga desa ataupun oleh petugas kesehatan di desa.

"Pada tahun 2008 mulai Ibu [saya] masuk jadi kader. Jadi mungkin kan di sini, jadi Pak Kuwu [kepala desa] seolah-olah memilih. Katanya kan kelihatannya katanya Ibu tuh aktif orangnya. Katanya aktif, kiyengan [memiliki niat yang bagus dalam mengerjakan sesuatu] katanya, telaten. Oleh Pak Kuwu [kepala desa], Ibu dijadiin sebagai kader. Jadi kader posyandu dulu." (Srikandi, desa penelitian di Cirebon, 23 Februari 2019).

"Kalau untuk Bu Sri, dia gak punya pendidikan tinggi, tapi niat untuk belajarnya gede [besar]. Beliau itu ada kemauan yang kuat, "Saya hanya bisa beribadah di sini", gitu. Siapa pun beliau adalah pemotor yang mau peduli tentang lingkungan, tentang keberadaan kaum yang ada di sekitarnya, dan untuk mengajak seperti yang beliau itu kan perlu proses. Jangankan seperti Bu Sri, jadi Kader Posyandu aja kadang-kadang orang desa itu, sangat susah loh bu, rasa takutnya besar. Rasa takutnya [karena], "ah engga ah, saya orang tidak berpendidikan", itu tetep ada. Tapi kalau sudah terbiasa dengan perkumpulan ke desa kayak gitu, dia punya ada niat untuk belajar, terus ada niat ingin tahunya besar, nah berarti dia akan memotivasi diri sendirinya akan kuat." (Bidan Koordinator Puskesmas Kecamatan, Cirebon, 25 Februari 2019).

Bentuk kepercayaan lainnya dari warga desa adalah dengan penunjukannya sebagai Ketua RW dalam rapat yang seluruhnya dihadiri oleh para laki-laki. Puncak dari pencapaian beliau terjadi pada pertengahan tahun 2019 ia menjadi satu di antara enam belas perempuan akar rumput Indonesia yang mendapatkan kesempatan

¹¹ Wawancara dengan petugas puskesmas, Maret 2019.

¹² Wawancara dengan Koordinator senior program, antara lain November 2019 di Yogyakarta dan percakapan selama riset lapangan Cirebon Februari-Maret 2019.

¹³ Keterangan dari Koordinator senior program MAMPU-'Aisyiyah, November 2019.

menghadiri acara *International Women's Day* di Istana Negara. Menjelang akhir tahun 2019, ia juga mendapatkan prestasi berupa Juara II Tingkat Kabupaten Cirebon Lomba Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Berprestasi Tahun 2019.

Kader perempuan lainnya yang menonjol adalah Ibu Hatini. Sebelum menjadi Kader Kespro BSA, Ibu Hatini telah menjalani aktivitas di Posyandu (2007), PKK (2008), dan Kader Posyandu (2013) untuk memerangi penyakit tuberculosis (TB). Pada tiga kegiatan tersebut ia mengaku melakukan aktivitas secara terbatas.

"[Sebagai kader Posyandu], tugasnya cuman nimbang aja sih. Di blok [dusun] sini. [Sebagai] kader PKK, ada rapat ini PKK gitu. Rapatnya di desa, di kecamatan juga. Tugasnya ya apa sih ya, paling ya itu mengerjakan pokja-pokja itu. Tugasnya gini, mengawasi atau apa ya, mengetahui tentang sekolahan ada berapa. Pendataan sekolah. [Sebagai] kader TB tuh yang sama Bu Sri tuh. Tadinya sih ikutan, cari orang yang sakit tuberkolosis. Lalu lapor ke puskesmas." (Hatini, desa penelitian di Cirebon, 2 Maret 2019).

Atas keterlibatannya di PKK dan Posyandu, Ibu Hatini diarahkan untuk menjadi Kader Kespro BSA oleh pemerintah desa. Penunjukan ini membuka peluang baginya untuk mendapatkan pengalaman kepemimpinan dan berorganisasi, serta pengetahuan baru. Ibu Hatini yang pada awalnya sangat pemalu, mendapatkan keberanian untuk berpendapat melalui kegiatan-kegiatan penguatan kapasitas yang diberikan oleh PD 'Aisyiyah kepada kader-kadernya.

"Ya senang ya. Senang aja, kan dapat pengetahuan banyak dari 'Aisyiyah tuh. Ya pertama kali di hotel yang, ya bagus lah. ['Aisyiyah] tuh bantulah sama kader-kader desa tuh. Jadi kalau ada apa-apa tuh dia yang maju. Apalagi di desa, walaupun di kecamatan, di sipil. Enak lah. [Kader] didorong-dorong [oleh 'Aisyiyah], jadi sekarang berani tuh. Berani ngungkapin ada mengusulkan pendapat, atau apa aja." (Hatini, desa penelitian di Cirebon, 2 Maret 2019).

Ibu Hatini juga tokoh perempuan yang berperan penting dalam pengelolaan Kelompok Wanita Tani (KWT). Pada akhir tahun 2018, ia mendapatkan kesempatan mengelola kebun gizi 'Aisyiyah, yaitu sebidang tanah yang ditanami dengan sayur mayur. Kebun gizi merupakan proyek percobaan PD 'Aisyiyah Kabupaten Cirebon yang tengah menjajaki aktivitas ekonomi yang cocok dengan minat perempuan desa. Dalam perkembangannya, aktivitas kebun gizi memberikan banyak manfaat bagi perempuan desa, dan mengindikasikan potensi sebagai wahana perekat aksi kolektif perempuan di desa. Pada tahun 2019, dibentuklah Kelompok Wanita Tani (KWT) MAMPU 'Aisyiyah, di mana Ibu Hatini diberikan kesempatan untuk memimpin. Kesempatan ini ia peroleh setelah para kader memilihnya untuk menjadi ketua.

"Gimana kalau Bu Hatini aja, kata semua tuh temen-temen, yang jadi ketuanya. Dih kata saya, emoh ah. Eh kamu yang mengelola je, ya kamu ketua gitu... Tugasnya ya itu... kalau udah banyak rumputnya saya...baru sama temen-temen, "euy ayo hari apa nyabutin rumput". Saya tuh dikasih modal, modal dari Aisyiyah tuh. Nah kan buat macul, e buat semprot hama, buat apa aja. Sama itu tu kelompok tuh, "nih kamu jualan ini, jualan berapa iket. Dibagi-bagikan dulu ke kelompok. Nih kamu jualan ini segini harganya segini." (Hatini, desa penelitian di Cirebon, 2 Maret 2019).

Dalam perjalanannya memimpin KWT, Ibu Hatini berkesempatan mengembangkan diri melalui tugas-tugas yang diembannya, meliputi: kegiatan mengatur jadwal pemeliharaan tanaman untuk anggota kelompok, mengkoordinasikan pengolahan tanah, proses penanaman, panen, distribusi hasil panen, hingga mengumpulkan hasil penjualan panen. Capaian positif ini pun berhasil menginspirasi orang-orang di sekelilingnya untuk turut bergabung ke dalam kelompok-kelompok perempuan, termasuk putrinya sendiri.

"Saya melihat mamah itu positif banget. Kayak jualan sekarang nggak takut. Apapun yang dia lakuin maju sendiri. Di kebun gizi kan dia didorong oleh keluarga dan 'Aisyiyah. Padahal dulu kan gak berani banget di masyarakat. Sekarang Alhamdulillah berani bermasyarakat, berorganisasi, dan bermasyarakat. Saya ikut sekolah kader yang diadakan 'Aisyiyah. Itu kan nginep ya, banyak pelajaran sih dari 'Aisyiyah-nya. Itu tahun 2018.

Di situ juga ada kegiatan sosialisasi ke masyarakat mengenai kehidupan ekonominya.” (Anak perempuan Hatini, desa penelitian di Cirebon, 3 Maret 2013)

Kader Kespro BSA lain yang juga menunjukkan capaian signifikan adalah Ibu Sutianti yang sejak tahun 2018 mendapatkan posisi strategis sebagai sekretaris desa. Dalam posisinya yang baru sebagai perangkat desa, ia semakin berkesempatan terlibat dalam proses pengambilan kebijakan di level desa. Bila sebelumnya ia tidak berkesempatan mengikuti rapat-rapat, kini ia terlibat dalam Musrenbangdes, bahkan menjadi aparat yang bertugas untuk membuat draft kebijakan pada level desa.

“[Dulu] kalau yang namanya perempuan jadi perangkat tuh paling di dapur aja, maksudnya itu nyediain snack, nyediain daftar hadir gitu aja teh. Nggak ikut rapat, nggak seperti sekarang. Sekarang sih rapat tiga puluh persen harus ada dari wanitanya gitu, (untuk) rapat Musrenbangdes. [Sekarang] perdes-perdes itu ibu [saya] semua yang nyusun tuh.” (Ibu Sutianti, desa penelitian di Cirebon, 2 Maret 2019).

Perubahan besar yang memperlihatkan pergeseran peran perempuan perangkat desa dari mengerjakan urusan domestik-administratif menjadi urusan substantif ini terjadi karena beberapa hal. *Pertama*, tahun 2016, atau dua tahun setelah terlibat sebagai Kader Kespro BSA, kepala desa mengangkat Ibu Sutianti dari Bendahara merangkap Kaur Pemerintahan menjadi Sekretaris Desa. Posisi ini dengan serta merta membawa kesempatan baginya untuk terlibat dalam rapat-rapat dan perumusan kebijakan desa. *Kedua*, keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan telah didorong tidak saja oleh peraturan pemerintah yang mensyaratkan kehadiran 30 persen perempuan dalam Musrenbangdes, tetapi juga menjadi isu yang selama ini dikomunikasikan oleh PD ‘Aisyiyah secara informal kepada kepala desa.

“[Musrenbangdes] udah mulai siang hari, kemudian juga kita minta ke kepala desanya tolong perempuannya diundang, bener-bener resmi gitu kan.” (Ketua Koordinator Program MAMPU-Aisyiyah, desa penelitian di Cirebon, 21 Februari 2019).

Selanjutnya, dalam posisinya sebagai Kader Kespro BSA, Ibu Sutianti juga menjalankan peran penting. Saat PD ‘Aisyiyah datang pertama kalinya tahun 2014, kepala desa merekomendasikannya sebagai motivator ‘Aisyiyah atau koordinator kader. Ia mendapatkan kepercayaan untuk memilih kader karena kedekatannya dengan kader-kader PKK dan Posyandu.

“[kata Kepala Desa], ya udah Bu Sutianti aja nih bu yang cari kadernya...soalnya deket sama kader-kader... Kalau motivator kan yang itu kegiatan itu teh, misalnya bikin jadwal kegiatan untuk bulan sekarang. Misalnya sosialisasi tentang apa nih misalnya alat KB.” (Sutianti, desa penelitian di Cirebon, 2 Maret 2019).

Perannya baik sebagai kader sekaligus aparat desa juga memberikan banyak peluang baginya untuk tampil dalam forum-forum edukasi kesehatan yang diagendakan oleh Puskesmas, baik yang bekerjasama dengan pemerintah desa maupun hasil kolaborasi dengan PD ‘Aisyiyah. Ibu Sutianti kerap terlihat menjadi moderator dalam sosialisasi kesehatan baik kesehatan reproduksi (agenda ‘Aisyiyah beserta Puskesmas) ataupun sosialisasi kesehatan lainnya (agenda dari Puskesmas dan pemerintah desa).

Selanjutnya, dengan capaian yang beragam pada level individu, penguatan kapasitas perempuan desa juga menunjukkan tiga capaian penting secara kolektif, sebagaimana akan disajikan dalam bahasan mengenai aksi kolektif perempuan berikut ini.

3. Aksi Kolektif Perempuan Desa

Dengan segala tantangan khususnya dari sisi sumber daya manusia, aksi kolektif perempuan berhasil menunjukkan wajahnya melalui tiga aktivitas berikut, yaitu keterlibatan perempuan desa dalam perumusan rancangan peraturan desa tentang kesehatan reproduksi perempuan, keaktifan mereka dalam Kelompok Wanita Tani (KWT), serta keterlibatan mereka di Musrenbang.

3.1. Keterlibatan Perempuan Desa dalam Perumusan Rancangan Perdes No. 07 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kesehatan Reproduksi Perempuan

Pada tahun 2017, desa penelitian di Kecamatan Talun ini telah memiliki peraturan desa (perdes) tentang kesehatan reproduksi perempuan. Perdes Nomor 07 tahun 2017 merupakan capaian penting advokasi yang menyertakan perempuan desa dalam perumusannya. Keberadaan perdes ini dihasilkan melalui serangkaian proses, yang diawali pada pertengahan tahun 2017 ketika PD 'Aisyiyah menginisiasi pelatihan penyusunan perdes bagi kepala desa, perangkat desa, Badan Perwakilan Desa (BPD), dan juga Kader Kespro BSA. Proses perumusan juga melalui diskusi mengenai permasalahan yang menimpa perempuan di desa. Aktivitas ini merupakan bagian dari strategi memperkuat aksi kolektif perempuan di bidang kesehatan reproduksi, yang juga menjadi kesempatan penting bagi kader untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Pada proses diskusi ini, Kader Kespro BSA mendapatkan kesempatan terlibat langsung dalam proses perumusan kebijakan. Untuk pertama kalinya, mereka terlibat dalam forum bersama perangkat desa guna mendiskusikan permasalahan desa. Pada tahapan ini, mereka menjadi peserta aktif dalam *Focus Group Discussion* (FGD) yang menyampaikan temuan dari pengamatan mereka di lingkungannya.

"Jadi selain [informasi] yang dikumpulkan oleh kader di dalam forum FGD itu kemudian ada penambahan, penguatan, ada juga sanggahan begitu ya dari pihak-pihak semua yang hadir, gitu. Nah setelah itu kemudian disepakati nih, ada permasalahan begini kita butuh payung hukum begini, ayo kita latihan bagaimana menyusunnya." (Sekretaris Pimpinan Wilayah (PW) 'Aisyiyah Provinsi Jawa Barat, 28 Februari 2019).

Ibu Sutianti, Kader Kespro BSA yang menjabat sebagai Sekretaris Desa pun mendapatkan kesempatan emas untuk belajar mengenai perumusan peraturan desa. Pelatihan ini tidak saja memberikan bekal yang bermanfaat bagi perannya sebagai kader, tetapi juga sebagai aparat desa yang salah satu tugasnya adalah membuat draf kebijakan.

"Kan yang seharusnya sih yang nyusun perdes tu BPD kan... tapi karena BPD nya pakem [vakum], ya jadi terpaksa (pemerintah) desa. Maksudnya wis terserah Sekdes aja lah... BPD itu tinggal nyetujuin aja waktu musyawarah... Iya. Perdes-perdes itu ibu [saya] semua yang nyusun tuh. Perdes masalah SOTK [Susunan Organisasi dan Tata Kerja Desa], perdes masalah itu pelelangan titisara [sewa tanah kas desa]... BPD nya tinggal musyawarah sama tanda tangan gitu aja." (Ibu Sutianti, desa penelitian di Cirebon, 2 Maret 2019).

Hal di atas menunjukkan bahwa pelatihan penyusunan raperdes merupakan agenda strategis PD 'Aisyiyah untuk menyodorkan agenda kebijakan sekaligus memberdayakan kadernya. Capaian kemajuan kader yang berbeda-beda menjadikan program ini secara spesifik memberikan kemanfaatan untuk aksi kolektif perempuan melalui Ibu Sutianti sebagai ujung tombak kebijakan tetapi juga memberikan pengalaman bagi kader lainnya untuk mengenal salah satu tahapan proses kebijakan.

"Kita melakukan pemberdayaan dan penguatan itu adalah berdasar pada kebutuhan... Untuk pelatihan, mbak, kita usahakan seperti itu. Tahap satu ketika mereka sudah punya awareness, punya care gitu ya, kepedulian. Maka [selanjutnya] kita masuk tahap kedua [yaitu] penguatan kapasitas. Nah ini yang saya maksudkan kita tidak punya batas waktu khusus itu ya masalah penguatan ini, karena beda-beda mana yang harus dikuatkan pun berbeda-beda. Kayak Bu Sutianti karena beliau ada di birokrasi kemudian beliau harus mengawal kebijakan desa. Maka kemarin yang kami dorong penguatan untuk beliau itu adalah pendampingan penyusunan raperdes." (Sekretaris Pimpinan Wilayah (PW) 'Aisyiyah Provinsi Jawa Barat, 28 Februari 2019).

Pada sisi lain, kegiatan ini juga bermanfaat untuk pemerintah desa sebagaimana diakui oleh kepala desa:

"Saya pribadi, pemerintah desa, ataupun masyarakat sangat membutuhkan istilahnya begitu, materi, penyuluhan-penyuluhan. Karena ya [pada] dasarnya SDM kita ini sangat rendah." (Kepala Desa, desa penelitian di Cirebon, 1 Maret 2019).

Sambutan positif dari kepala desa tersebut menjadi beralasan karena pelatihan penyusunan raperdes menghadirkan tenaga ahli dari Universitas Padjajaran—universitas terkemuka di Jawa Barat. Penghadiran tenaga ahli ini merupakan bentuk dukungan dari Pimpinan Wilayah (PW) 'Aisyiyah Provinsi Jawa Barat dalam menanggapi kebutuhan pemberdayaan perempuan di tingkat kabupaten. Tim ahli ini dibiayai oleh PW 'Aisyiyah Provinsi Jawa Barat, sedangkan pemerintah desa memfasilitasi tempat dan konsumsi pelatihan.

"Nah ini salah satu juga tugas [Pimpinan] Wilayah adalah menyambungkan kebutuhan mereka [Pimpinan di tingkat kabupaten] dengan sumber daya kami. Kami di tingkat wilayah itu ada Majelis Hukum dan HAM, itu kebetulan pakar-pakar hukum dari UNPAD [Universitas Padjajaran]. Itu yang kami turunkan gitu." (Sekretaris Pimpinan Wilayah (PW) 'Aisyiyah Provinsi Jawa Barat, 28 Februari 2019).

Kehadiran tenaga ahli tidak semata penting dalam meningkatkan pengetahuan dan kapasitas teknis terkait penyusunan perdes, tetapi juga sebagai fasilitator yang memungkinkan perumusan kebijakan berproses secara deliberatif. Melalui proses ini perempuan desa dapat menyampaikan permasalahan kesehatan reproduksi yang dihadapi oleh komunitasnya sehingga menyadarkan pemerintah desa dan BPD mengenai urgensi mengeluarkan kebijakan yang mendukung agenda kesehatan reproduksi perempuan:

"Sekarang ini yang kanker payudara banyak. Terkadang yang belum punya suami aja udah kena. Nah istilahnya dengan Aisyiyah-MAMPU, dengan kebutuhan-kebutuhan itu, kita mengajukan [agar] dibentuk dulu, diperkuat dengan peraturan desa. Perdes Kespro itu memperkuat secara hukum untuk [pemerintah desa] mengeluarkan anggaran di APBDes... Dengan adanya peraturan [akan] menyelamatkan kami, jangan sampai pengeluaran anggaran tidak mendasar gitu." (Kepala Desa, 1 Maret 2019).

Selanjutnya, jika perumusan raperdes hanya melibatkan sedikit kader, dalam proses uji publik, seluruh Kader Kespro BSA hadir. Pada tahapan ini pemerintah desa menjadi penyelenggara dan mengundang kegiatan.

"Nah setelah penyusunan, oleh tim desa, kemudian uji publik gitu. Dipanggil (lah) warga masyarakat. Kalau dalam penyusunan kan tidak semua masyarakat ikut ya, artinya ya tim sebelasnya: BPD, aparat desa, plus beberapa kader saja, nah di uji publik ini semua dihadirkan lagi. Disampaikan, dibacakan satu persatu masih ada nggak sanggahan dan lain sebagainya. Selesai dari situ baru naiklah ke pengesahan." (Sekretaris Pimpinan Wilayah (PW) 'Aisyiyah Provinsi Jawa Barat, 28 Februari 2019).

Raperdes ini kemudian berproses pada level pemerintah desa dan BPD hingga ditetapkan sebagai Perdes No. 7 tahun 2017 pada 16 Oktober 2017. Kehadiran perdes ini menghadirkan optimisme bagi advokasi kesehatan reproduksi, dan juga memperkuat komitmen pemerintah desa bagi agenda kesehatan reproduksi perempuan di desa. Optimisme ini misalnya terkait dengan pembiayaan pengobatan sebagaimana disampaikan oleh Kader Kespro:

"Katanya nanti apabila ditemukan [penderita penyakit] yang kronis yang benar-bener dia di luar jangkauan [kemampuan finansial untuk memperoleh pengobatan], biayanya nanti ada bantuan dari desa." (Ibu Srikandi, Kader Kespro, desa penelitian di Cirebon, 26 Februari 2019).

Hal tersebut tidak berlebihan sebab Perdes No. 07 Tahun 2017 mencantumkan jaminan penganggaran dari sumber-sumber yang beragam. Hal itu merupakan dukungan penting bagi aksi kolektif perempuan pada isu kesehatan reproduksi. Secara umum, lingkup perdes ini mencakup, *pertama*, dimensi pencegahan, yaitu meliputi sosialisasi, pemeliharaan lingkungan kesehatan, pelatihan pendampingan, dan deteksi dini gangguan kesehatan reproduksi. *Kedua*, dimensi penanganan gangguan kesehatan reproduksi yang meliputi penanganan pertama, penanganan lanjutan, optimalisasi layanan kesehatan yang tersedia. *Ketiga*, dimensi penganggaran yang mencakup sumber pendanaan baik dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa, swadaya masyarakat, hibah dari program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, kerjasama Miliki Desa, kerjasama dengan pelaku usaha, dan/atau pendapatan lain yang sah. Serta *keempat*, partisipasi masyarakat yang meliputi sosialisasi informasi kesehatan reproduksi, pendampingan pada penderita gangguan reproduksi,

perencanaan dan penanganan gangguan kesehatan reproduksi, pendirian warung gizi, informasi keberadaan masyarakat yang menderita gangguan kesehatan reproduksi. Yang menarik, pada pasal 19, perdes ini juga memberikan dukungan bagi pendirian warung gizi. Karena itu, keberadaan pasal ini menunjukkan keberhasilan PD 'Aisyiyah dalam menegosiasikan kepentingannya untuk mendukung aksi perempuan melalui kebun gizi (lihat pembahasan pada poin 3.2. di bawah).

Meski demikian, masih terdapat beberapa tantangan terkait advokasi kesehatan reproduksi perempuan di desa. Dari sisi aparat pemerintah, hingga awal tahun 2019, keberadaan perdes ini ternyata belum menjadi kepedulian atau bahkan pengetahuan bersama. Beberapa orang aparat desa mengaku belum mengetahui isi perdes secara jelas. Walaupun beberapa dari mereka mengakui selalu dilibatkan dalam rapat-rapat perencanaan perdes, tetapi ketidakpahaman ini berpotensi menjadi masalah di internal pemerintah desa.

"Kalau perumusan ya [mengetahui]... rapat apapun memang selalu dilibatkan. Tapi kalau yang tadi ibu pertanyakan...[isi perdes] kita nggak tau, saya menyampaikan kan nanti salah karena kan memang pada dasarnya tidak tau perdes-nya seperti apa, isinya seperti apa kan nggak tau." (Bapak Bagus, perangkat desa, desa penelitian di Cirebon, 6 Maret 2019).

Hal senada juga disampaikan oleh narasumber yang berbeda:

"Sebagian kecil saya tau kalau maksimal saya nggak tau, belum tau dan belum disosialisasikan. Dan misalkan juga saya ya barangkali karena saya tugas di luar barangkali mungkin saya nggak mengetahui." (Bapak Suripto, perangkat desa, desa penelitian di Cirebon, 6 Maret 2019).

Karena itu, bila proses perencanaan, perumusan, hingga pengesahan perdes relatif tidak mengalami kendala, proses selanjutnya justru berpotensi mengalami banyak tantangan. Hal ini karena lemahnya aspek pelebagaan perdes di internal pemerintah desa. Hingga penelitian lapangan ini dilakukan, peraturan pelaksana yang diamanatkan oleh perdes untuk dibuat selambatnya satu tahun setelah perdes lahir, belum dibuat. Sosialisasi pada level perangkat pemerintah desa serta anggota BPD dan LPMD juga belum selesai. Wawancara dengan beberapa narasumber dari dua lembaga tersebut juga memperlihatkan bahwa mereka mengetahui tentang keberadaan perdes yang didorong oleh 'Aisyiyah tetapi tidak mengetahui poin-poin pokok yang diatur oleh perdes.¹⁴ Akibatnya peluang melibatkan aktor lain selain kepala desa atau bahkan lembaga desa secara utuh untuk mengawal kebijakan ini menjadi lemah.

Dari sisi masyarakat, tantangan terbesar adalah menjaga komitmen kelompok perempuan. Bila para kader perempuan dibayangkan akan menjadi agen pengawal kebijakan dan penganggaran di sektor kesehatan reproduksi, maka terdapat dua potensi tantangan. *Pertama*, perempuan desa yang tergabung sebagai Kader Kespro BSA maupun Kader BSA belum seluruhnya mampu mengoptimalkan kepercayaan diri mereka. Sebagian besar dari mereka masih menempatkan kehadiran PD 'Aisyiyah sebagai semangat bagi keberanian mereka berbicara di depan publik.¹⁵ Hal ini pun terbaca oleh Kepala Desa:

"Di sini ada kelemahan, yang vokal kadernya itu hanya beberapa orang saja, banyaknya memberi penyuluhannya gerombolan, tidak memakai forum. Belum berani. Yang saya harapkan sudah ada pembekalan, ada pelatihan itu saya harap kemandirian gitu. Sedangkan kalau 'Aisyiyah-MAMPU itu kan orang lain, pihak lain bukan warga kita, ya kadernya itu orang kita, (orang) sini (yang) harus meneruskan. Tapi ya cuman gitu, jadi sementara ini kalau yang muda, SDM-nya itu lah, kalau yang usia-usia Bu Srikandi [40-50 tahun] itu jangan nyari-nyari perempuan, laki-laki aja gak ada. Ya seangkatan dengan istri itu ada lima [kader], [tingkat pendidikan] SD... Dan yang berani usulan juga hanya berani usulan. Bisa ngerti dari pelatihan, tapi gak bisa menyampaikan, kan istilahnya tidak bisa membumbui bicaranya gimana, ya mentok. Nah kita kendalanya itu." (Kepala Desa, desa penelitian di Cirebon, 1 Maret 2019).

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Ahmad, laki-laki anggota BPD, 3 Maret 2019.

¹⁵ Obrolan dengan beberapa orang kader secara terpisah selama penelitian ini berlangsung.

Kedua, kecenderungan di desa menunjukkan bahwa formasi kader perempuan biasanya berganti seiring dengan bergantinya kepala desa.¹⁶ Kader-kader yang dimaksud adalah kader-kader PKK dan Posyandu, atau mereka yang sejak 2014 direkomendasikan untuk menjadi Kader Kespro BSA. Apabila hal ini terjadi, maka pada tahun 2022, kader-kader perempuan desa akan digantikan oleh kader-kader baru yang dipilih oleh kepala desa yang baru. Namun kader-kader PKK dan Posyandu yang telah direkrut menjadi Kader Kespro BSA masih sangat mungkin tetap menjadi bagian dari lembaga ini, sebab mereka telah menjadi investasi keberadaan perempuan desa yang terdidik dan terlatih dengan isu-isu kesehatan reproduksi. Meski demikian, pelembagaan pengetahuan dan semangat pada diri para kader untuk aktif selalu dalam isu-isu publik di desa perlu dijaga, terlebih apabila harus digantikan oleh kader baru mengikuti pergantian kepala desa.

3.2. Pembentukan Kelompok Wanita Tani (KWT) Sebagai Strategi Konsolidasi Kegiatan Kolektif Perempuan Desa

Pada tahun 2018 Pimpinan Daerah (PD) 'Aisyiyah memperluas kegiatan advokasi di desa. Hal tersebut dilakukan dengan cara mendirikan Kelompok Wanita Tani (KWT) yang diberi nama KWT MAMPU 'Aisyiyah. KWT ini mengerjakan apa yang mereka sebut sebagai Kebun Gizi, yaitu sebidang lahan pertanian yang ditanami aneka sayuran (dan kemudian buah). Dalam kerangka kerja 'Aisyiyah, Kebun Gizi mewujudkan salah satu agenda kerja program Rumah Gizi 'Aisyiyah, yaitu program pencegahan dan penanganan stunting berbasis komunitas.¹⁷ Kader BSA, dengan dimotori oleh mereka yang menjadi bagian dari Kader Kespro BSA, merupakan pihak yang mengelola kegiatan ini. Mereka bertemu secara rutin seminggu sekali untuk membuat pembagian kerja, merencanakan jenis tanaman dan masa tanam, serta merancang pengelolaan hasil dan rencana tanam berikutnya.

Bagi 'Aisyiyah, aktivitas ini termasuk dalam agenda pendampingan, khususnya yang bertujuan untuk menarik minat perempuan untuk terus beraktivitas dalam komunitas. Agenda di bidang ekonomi ini penting agar para kader tetap memiliki komitmen menjalankan agenda utama di bidang kesehatan reproduksi dan gizi.

"Nah ini bicara sustainability [agenda]. Jadi kemarin-kemarin itu ketika kami memberdayakan itu ya sebenarnya juga nggak ada dana dari MAMPU gitu ya. Tapi ibu-ibu diajari untuk saving [agar] dana kecil-kecil itu menjadi sesuatu." (Sekretaris Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Provinsi Jawa Barat, 2 Maret 2019).

Hal ini sejalan dengan strategi pendampingan untuk anggota Balai Sakinah 'Aisyiyah (BSA), di mana KWT merupakan perwujudan dari tiga agenda sekaligus yaitu: agenda untuk pemenuhan gizi keluarga, pertanian, dan menambah pendapatan keluarga. Pada sisi lain, KWT dapat pula berfungsi sebagai alternatif untuk memperkuat konsolidasi perempuan desa melalui aktivitas yang lekat dengan keseharian mereka yaitu bertani. Hal ini penting mengingat upaya meningkatkan kapasitas perempuan desa untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan yang berpihak pada agenda kesehatan reproduksi masih memerlukan jalan panjang.

Pembentukan KWT juga semakin dibutuhkan karena desa di Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon ini belum memiliki kelompok tani khususnya kelompok tani perempuan. Padahal pemerintah melalui sejumlah regulasi telah mendorong agar kelembagaan petani yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk kepentingan petani. Hal ini misalnya melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani. Kelompok wanita tani, dalam hal ini

¹⁶ Perbincangan dengan beberapa orang kader 'Aisyiyah, 24 Februari 2019.

¹⁷ Konsep Rumah Gizi 'Aisyiyah mencakup tujuh kegiatan yaitu edukasi gizi, konseling gizi, konseling menyusui, pengolahan makanan bergizi, kebun gizi, sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat, dan pelibatan keluarga serta tokoh agama dalam peningkatan gizi. Kegiatan yang termasuk di dalamnya meliputi aktivitas sosialisasi (kesehatan reproduksi dan gizi), Konseling (Gizi dan ASI Eksklusif), pemanfaatan lahan kosong sebagai sumber makanan bergizi (tanaman sayuran, perikanan, peternakan), pengolahan dan pemberian makanan tambahan bagi anak-anak kurang gizi dan *stunting*, sanitasi lingkungan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, pelibatan keluarga seperti suami dan nenek dalam edukasi terkait gizi dan kespro. ('Aisyiyah Kabupaten Cirebon, melalui surat elektronik, 15 Juli 2020).

merupakan variasi kelompok tani yang berfungsi sebagai wadah pemberdayaan perempuan melalui aktivitas bertani.¹⁸ Namun di desa ini, KWT belum pernah dibentuk hingga PD 'Aisyiyah menjajaki hal tersebut:

"[di desa ini] belum pernah dibentuk KWT. Itu salah satu gagasan 'Aisyiyah MAMPU.'" (Kepala Desa melalui pesan whatsapp, desa penelitian di Cirebon, 16 Agustus 2019).

Karena itu, pembentukan KWT merupakan aktivitas positif yang didukung oleh pemerintah desa. Embrio pembentukan KWT diawali di penghujung tahun 2018, ketika PD 'Aisyiyah memberikan sedikit modal kepada perempuan desa (Ibu Hatini) untuk bertani. Aktivitas ini merupakan langkah awal untuk menjajal kemungkinan mengembangkan pertanian sebagai aktivitas ekonomi untuk kelompok perempuan. Pada tahap awal tersebut, Ibu Hatini (39 tahun) mengelola lahan pertanian dengan luas sekitar setengah bahu (sekitar 3.500 m²) di kawasan perbatasan desa. Berselang beberapa bulan kemudian aktivitas ini diperluas sebagai aktivitas bersama. PD 'Aisyiyah bersama pemerintah desa menyepakati pendirian KTW MAMPU 'Aisyiyah. Pemerintah desa bahkan menyediakan lokasi bertanam di area yang lebih strategis yaitu dekat dengan lokasi pasar desa sehingga memudahkan distribusi hasil pertanian. Lahan bertanam ini juga berukuran lebih luas yaitu 1 bahu atau sekitar 7000 m². Dalam perkembangannya yang cepat, KWT MAMPU 'Aisyiyah tampak menjanjikan sebagai sarana untuk mengkonsolidasikan perempuan desa. Namun sebelum mengelaborasi hal ini, proses pembentukan KWT sendiri mengalami dinamika yang menarik dan berpengaruh pada gerakan kolektif perempuan di desa.

Pembentukan KWT MAMPU 'Aisyiyah

Sebelum membentuk KWT "MAMPU Aisyiyah", Pimpinan Daerah (PD) 'Aisyiyah pernah menyelenggarakan beberapa pelatihan untuk memantik aktivitas ekonomi alternatif bagi perempuan desa. Namun aktivitas berupa pelatihan pembuatan sabun dan menjahit tidak berlanjut ke tahap produksi karena kendala penyediaan bahan baku dan pasar distribusi. Setelah proses awal menjajaki aktivitas pertanian sebagai aktivitas ekonomi kelompok perempuan, PD 'Aisyiyah mengundang Kader Kespro BSA serta Kader BSA untuk menjajaki kemungkinan pendirian KWT.

"Yang milih kan rapat. Yang datang semua. Kader 'Aisyiyah, kader Posyandu. Ya kalau 'Aisyiyah, Posyandu, PKK sih, itu aja ya [orangnya], tapi iya semua itu kader-kader itu lah. 'Aisyiyah PKK kan satu orang banyak jabatan. [Itu] yang sepuluh [orang]. Kalau yang lainnya, yang dua puluh mah biasa kader PKK sama Posyandu. Kan ada 60 kader sih... Terus akhirnya rapat. Kata ibu-ibu 'Aisyiyah, "eh gimana mbak kalau diadakan kebun gizi mau nggak, jadi kelompok gitu". Ya mau semua gitu." (Ibu Hatini, Ketua KWT Mampu 'Aisyiyah, desa penelitian di Cirebon, 3 Maret 2019)

Dari sisi proses, pembentukan KWT tidak mengalami kendala berarti. Untuk mendirikan KWT, PD 'Aisyiyah menempuh jalur komunikasi yang intens dengan kepala desa melalui pendekatan informal (komunikasi dan diskusi), sebelum menyepakati pendirian KWT secara formal.

Komunikasi yang intens antara PD 'Aisyiyah dengan kepala desa menghasilkan persetujuan pendirian KWT sekaligus dukungan pengembangan KWT. Persetujuan yang dituangkan dalam dokumen formal ini merupakan bekal penting yang memungkinkan pemerintah desa dapat mengalokasikan dukungan secara akuntabel, termasuk dalam pengalokasian anggaran, terutama Dana Desa yang dapat mendukung aktivitas masyarakat.

Karena itu pemerintah desa memfasilitasi formalisasi KWT melalui Berita Acara Pembentukan KWT pada Juli 2018. Dalam dokumen ini kepala desa merupakan penanggung jawab dari kelompok perempuan tani ini. Sedangkan kepengurusan KWT seluruhnya berisi perempuan desa yang telah tergabung sebagai Kader Kespro BSA dan Kader BSA. Para perempuan ini mengisi formasi mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, seksi-seksi (unit-unit kerja) hingga keanggotaan yang total melibatkan tiga puluh orang.

¹⁸ <https://www.sampulpertanian.com/2016/12/kwt-atau-kelompok-wanita-tani.html>.

Capaian KWT MAMPU 'Aisyiyah

Bagi 'Aisyiyah, formalisasi KWT merupakan capaian politik yang penting. KWT tidak saja mendapatkan legitimasi sebagai organisasi tani bagi perempuan dampungannya. Namun, formalisasi KWT juga membuka prospek bagi kelompok perempuan desa untuk mengakses dukungan dari pemerintah desa. Komitmen pemerintah desa terhadap pengembangan KWT pun diwujudkan melalui beberapa hal, seperti memberikan akses terhadap lahan kas desa, merencanakan dukungan untuk distribusi hasil, dan dukungan untuk pengembangan lainnya, seperti yang diringkaskan di Bagan 1 di bawah ini.

KWT MAMPU 'Aisyiyah berhasil memperoleh izin penggunaan lahan kas desa seluas 7000 m² untuk dikembangkan menjadi kawasan agrowisata. Dalam hal dukungan lahan kas desa ini, kepala desa mempermudah proses kepengurusan sewa lahan agar kelompok perempuan ini dapat mengembangkan usaha secara optimal. Secara administratif hal ini diwujudkan dalam bentuk pengajuan proposal oleh KWT dan kemudian bantuan modal dari pemerintah desa berupa pengalokasian sejumlah anggaran dalam Alokasi Dana Desa yang tidak diterima secara tunai namun dibayarkan kembali kepada desa sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD) dari pos penyewaan lahan.

"Sewa...desa yang bayarin. Jadi dari anggaran ADD ke PAD.... KWT seolah-olah desa menganggarkan dari anggaran Dana Desa [untuk] membayar sewa. Bukan sewa, bahasanya apa ya memberi bantuan modal ke KWT. Beri bantuan modal... toh masuk juga PAD, jadi muter uangnya. Saya sangat memahami masyarakat ya...Udah lari saja minta disokong, bahasanya gitu. Apalagi itu bukan jalan ya tapi merayap... Makanya kan itu ya udah yang penting jalan aja dulu biar dia merasakan hasil, akhirnya semangatnya itu ada. Prinsip saya begitu." (Kepala Desa, desa penelitian di Cirebon, Februari 2019).

Dalam kesempatan yang lain, kepala desa menegaskan bahwa kebijakan tersebut bersifat sementara sebagai modal untuk mendorong KWT berkembang menjadi agribisnis.

"Lahan [sebenarnya] terhitung sewa. Itu hanya masuk modal. Karena belajar agrobisnis, walaupun hasil nihil misalnya. KWT suruh belajar berbisnis" ((Kepala Desa melalui pesan whatsapp, desa penelitian di Cirebon, 28 Agustus 2019).

Bagan 1. Capaian KWT MAMPU 'Aisyiyah (2018-Juni 2020)

1. Memperoleh izin penggunaan lahan kas desa seluas 1 bahu (7.000 m²) dengan dukungan bantuan modal yang bersumber dari Alokasi Dana Desa yang tidak diterima tunai tetapi disetorkan oleh desa kepada kas desa sebagai pendapatan dari penyewaan lahan.
2. Komitmen dari kepala desa untuk alokasi dana sebesar Rp3 juta dari Dana Desa tahun 2020 untuk pembibitan.
3. Penjajakan kerjasama dengan universitas lokal untuk pengembangan agrobisnis
4. Rencana Pengembangan Kebun Gizi menjadi Area Wisata Cerdas Taman Matahari pada pertengahan 2020

Karena itu pula aktivitas KWT yang terus didampingi oleh PD 'Aisyiyah bergerak cepat. Hal ini diwujudkan dengan aktivitas pertanian harian hingga merancang agenda pengembangan untuk dapat merambah dunia agrobisnis. Dalam proses ini, PD 'Aisyiyah dan KWT terus mencari format agrobisnis yang strategis untuk mendukung penguatan ekonomi anggota. Hal itu menyusul keberhasilan mereka dalam mengumpulkan keuntungan pertama sebagai tabungan untuk perencanaan pembibitan dan keperluan membeli pupuk. Pada tahap ini KWT tampak mulai berpeluang merintis usaha agrobisnis yang menguntungkan kelompok maupun individu anggota.

"Kan ini termasuknya [milik] kelompok, jadi kan duitnya (keuntungan penjualan sayuran) dikumpulin... Udah dapatnya berapa, 350 [ribu]... Kayaknya sih 3 bulan [menanam]... Itu sih soalnya kangkung sama cesim yang

cepat dapat duitnya tuh. [Ngejualnya] di sini aja, sama kader-kader...Nih kamu jualin ini, jualin berapa ikat. Dibagi-bagikan dulu ke kelompok. Nih kamu jualan ini segini harganya segini dari saya. Ntar saya ambil untung. Kalo kangkung seiket 800 dari sayanya. [Mereka] ambil. Kan 1 ikat dapatnya 200 perak. Kangkung 800 dijual 1000. Kalau caysim perkilo. Kan dari saya 4000, dijual 5000. Kalau anggota lain yang ngejual nanti keuntungannya buat dia” (Ibu Hatini, Ketua KWT, 2 Maret 2019).

Dalam proses selanjutnya, PD ‘Aisyiyah melakukan beberapa langkah untuk membantu pengembangan KWT. Hal itu antara lain dilakukan dengan penajakan peluang kerjasama agrobisnis dengan universitas lokal. Kebun Gizi yang pada awalnya hanya merupakan areal pertanian sayur mulai dirancang untuk juga menjadi lahan pertanian buah-buahan (pepaya dan melon).

“Ini kami baru pada tahapan pembibitan dan untuk MoU di atas kertas belum. Kita memang sempat ngobrol-ngobrol bagaimana KWT dan UGJ [Universitas Swadaya Gunung Jati] ke depan ingin mengembangkan KWT ini dengan cara agrobisnis... Perencanaan program-program apa-apa nanti yang kita buat kesepakatan mulai dari tanam sampai dengan pemasaran dan operasional akan kita inventarisir peluang-peluangnya...Kita data kendala-kendala dan kelemahan-kelemahannya” (Sekretaris PD ‘Aisyiyah melalui pesan Whatsapp, 29 Agustus 2019)

Aktivitas yang dinamis ini pun berhasil meyakinkan kepala desa untuk meneruskan komitmen mendukung kelompok perempuan. Pada tahun 2020 kepala desa membuka peluang untuk akses lapak di pasar desa sekaligus menyiapkan alokasi dana sebesar Rp3 juta dari pos Dana Desa untuk tahun anggaran 2020 selama KWT dapat memenuhi persyaratan administratif.

“Sudah dikondisikan anggaran cuman harus ada pengajuan supaya sesuai usulan. Ya [anggarannya berasal] dari Dana Desa masuk ke pemberdayaan” (Kepala Desa, desa penelitian di Cirebon, 28 Agustus 2019)

Proses pengembangan Kebun Gizi terus bertumbuh. Peluang kerjasama dengan universitas lokal yang tersendat digantikan dengan proses perencanaan pengembangan areal ini sebagai tempat rekreasi yang dinamai Wisata Cerdas Taman Matahari. Desain baru yang dibangun pada pertengahan tahun 2020 ini memberikan tantangan baru bagi KWT untuk mulai mengembangkan bisnis baru yang tidak semata menawarkan produk pertanian sayur dan buah-buahan namun juga keindahan kebun bunga matahari, lokasi foto, dan area kuliner.

Proyek baru ini pun menuntut kerja-kerja lobi lebih lanjut yang sementara ini masih dipimpin oleh PD ‘Aisyiyah. Sayangnya keberadaan pandemi Covid-19 menghadirkan tantangan tersendiri. Kelancaran dukungan dari Camat cukup berdampak, walaupun hal ini tidak menyurutkan upaya menggalang dukungan dari dinas-dinas di kabupaten.

“Dari Muspika [Musyawarah Pimpinan Kecamatan] sangat mendukung, bahkan Bapak Camat menyampaikan niatan untuk berbagi alat permainan sebagai Kecamatan Layak Anak, karena Kecamatan Talun dapat program pengadaan alat-alat permainan senilai Rp165 juta, cuma karena ada covid realisasi tertunda... [Dukungan juga datang dari] Dinas Pertanian dengan pemberian bibit cabe, bibit bunga matahari dan bibit buah naga... Pembuatan sumur bor... Kita juga lagi menjajaki dukungan dengan dinas-dinas terkait, termasuk Dinas Ketahanan Pangan, PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perikanan.” (Bendahara PD ‘Aisyiyah melalui pesan Whatsapp, 14 Juli 2020).

Agenda KWT

Perkembangan KWT yang pesat masih menyisakan sedikit agenda internal, yaitu integrasi seluruh pengurus dan anggota KWT dalam ikatan yang sama kuat. Hal ini karena para anggota belum berperan seaktif para pengurus.¹⁹ Keaktifan para pengurus yang sebagian besar merupakan anggota Kader Kespro BSA lagi-lagi dipengaruhi oleh kesiapan mereka dalam kegiatan pengkaderan yang telah lebih maju daripada para Kader

¹⁹ Keterangan Ibu Hatini, 2 Maret 2019.

BSA. Posisi mereka sebagai kader kespro yang selalu berkoordinasi untuk menyiapkan banyak hal termasuk menyiapkan aktivitas BSA memungkinkan mereka terpapar dengan lebih banyak aktivitas informal bersama PD 'Aisyiyah dibandingkan dengan mereka yang merupakan Kader BSA lainnya. Dalam konteks ini, intensitas komunikasi di luar forum berpengaruh terhadap keaktifan dalam KWT, dan kemudian keuntungan yang diperoleh.

Manfaat KWT bagi Agenda Advokasi Kesehatan Reproduksi

Sebagai aktivitas pendukung agenda advokasi kesehatan reproduksi, KWT memiliki prospek yang cukup besar untuk mengkonsolidasikan perempuan desa. KWT tidak saja menambah intensitas pertemuan dua kelompok perempuan yaitu Kader Kespro BSA dan Kader BSA, namun juga memungkinkan mereka mengeksplorasi kemampuan berorganisasi melalui aktivitas yang akrab dengan keseharian mereka yaitu bertani. Sementara PD 'Aisyiyah sebagai pendamping perlahan menyapih keterlibatan mereka untuk menjadikan kelompok ini lebih mandiri.

Hal ini terlihat misalnya dalam hal pengelolaan lahan dan pembagian kerja sehari-hari. Hatini sebagai Ketua KWT tidak saja bertanggung jawab terhadap aktivitas harian memelihara kebun, tetapi juga mengkoordinasikan anggota, memastikan pembagian tugas, serta mengusulkan agenda pengembangan kepada PD 'Aisyiyah. Salah satu usulan penting adalah dalam hal pemilihan lokasi strategis untuk kebun sayur yang berujung pada negosiasi PD 'Aisyiyah kepada pemerintah desa. Ketua KWT juga bereksperimen dengan tanaman, serta mengusulkan jenis tanaman dan pola penanaman di kebun gizi. Karena itulah pada level ini, PD 'Aisyiyah memperlihatkan keberhasilannya dalam mendorong kader desa untuk mengelola organisasi wanita tani, termasuk berani menyampaikan inisiatif kepada kelompok dan PD 'Aisyiyah sebagai pendamping.

Pengembangan diri yang cepat dari kader yang menjadi Ketua KWT juga ditopang dengan insentif berupa kesempatan mengembangkan minat bertani sekaligus kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari hasil bertani. Hatini dapat mengakses hasil tanaman lebih sering, dapat menjual dan memperoleh sedikit keuntungan dari hasil kebun. Suaminya juga mendapatkan kesempatan untuk mengkondisikan tanah menjelang masa tanam berikutnya. Untuk kegiatan ekstra ini sang suami mendapatkan upah harian sebesar Rp100 ribu selama kurang lebih satu minggu aktivitas. Dalam konteks kesempatan untuk mengeksplorasi diri dan hasil inilah, KWT memerlukan mekanisme yang lebih mapan di kemudian hari, agar kelompok ini mampu memberikan kemanfaatan yang lebih optimal untuk semua orang yang terlibat di dalamnya.

Sementara itu bagi pengurus dan anggota kelompok secara umum, daya tarik KWT terletak pada kesempatan bagi mereka terlibat dalam kegiatan sehari-hari bertani, juga peluang untuk mencicipi hasil pertanian bersama. Kurang dari satu tahun sejak KWT mengelola kebun sayur, mereka telah beberapa kali berhasil memanen. Pada panen pertama, hasil yang diperoleh lebih banyak disalurkan untuk agenda pemenuhan gizi keluarga (konsumsi anggota) dan penjualan dalam partai kecil melalui warung-warung sayur.

"[Panennya] bareng-bareng. Kadang-kadang bareng-bareng kalau mereka ada waktu ya itu kayak kemarin tuh. Ada yang ambil [sayuran], ya yang mau aja." [Ibu Hatini, Ketua KWT, desa penelitian di Cirebon, 2 Maret 2019].

Karena itulah aktivitas KWT kerap menarik perhatian perempuan desa yang belum tergabung dalam kelompok ini. Tidak jarang mereka datang kepada Ketua KWT, menanyakan kegiatan, melihat-lihat kebun, atau bahkan turut mencicipi hasil kebun.

"Eh aku mau ikut, cih [kak]. Gelem ta [Mau]? Kata saya. Kalau mau sih ayo gabung aja... Kadang-kadang sih ikut ke kebun gizi. Cuma lihat aja, tapi kalau saya sih ya sok [silahkan]. Kalau mau sih ambil gitu ya... Seumpama kangkung satu ikat, masa [harus] beli." [Ibu Hatini, Ketua KWT, desa penelitian di Cirebon, 2 Maret 2019].

Keberadaan KWT ini tidak hanya memberikan peluang penguatan ekonomi sebagai alternatif mata pencaharian bagi perempuan desa. Secara umum, aktivitas KWT telah memainkan peran krusial dalam

mempererat relasi perempuan desa. Komitmen yang terbentuk karena kepentingan yang sama, yaitu berlatih praktik mengelola kebun dan agrobisnis, menghadirkan prospek yang kuat untuk keberlanjutan aktivitas kolektif yang positif. Selain itu, nilai ekonomi yang dihasilkan melalui kegiatan KWT membantu meningkatkan posisi tawar para perempuan desa dengan pemerintah desa. Kegiatan ekonomi membuat manfaat dari kegiatan pemberdayaan wanita lebih dipandang positif oleh pemerintah desa. Karena itu, KWT Mampu 'Aisyiyah menjadi terobosan penting untuk menjaga komitmen perempuan desa untuk terus bekerja dalam sektor inti yang ditawarkan oleh PD 'Aisyiyah, yaitu peningkatan kualitas kesehatan reproduksi perempuan desa.

3.3. Pelibatan Perempuan dalam Musyawarah Desa (Musdes)

Terbitnya Perdes No. 07 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kesehatan Reproduksi menghasilkan peluang namun juga tantangan pemanfaatan untuk keperluan aksi bersama pada isu kesehatan reproduksi. Setelah pembentukan Kelompok Wanita Tani (KWT) yang penting untuk memupuk konsolidasi kelompok perempuan, PD 'Aisyiyah membantu mengkondisikan musyawarah desa agar kondusif untuk mendukung partisipasi perempuan dalam forum-forum pengambilan keputusan di desa. Hal ini dilakukan dengan cara mengusulkan kepada kepala desa untuk menyelenggarakan musyawarah desa (Musdes/Musrenbangdes) pada hari dan waktu yang ramah untuk perempuan desa, yakni tidak di malam hari. Jika sebelumnya Musdes dilaksanakan pada malam hari untuk mengakomodir kepentingan laki-laki dengan menunggu mereka selesai bekerja, pada akhir tahun 2018, untuk pertama kalinya Musdes diselenggarakan pada hari Minggu siang.

Langkah ini telah berhasil mendorong perempuan desa hadir dan menyampaikan usulan sederhana untuk penggunaan Dana Desa. Namun agenda untuk mencerdaskan dan memperkuat kapasitas perempuan desa masih memerlukan jalan panjang. Tingkat pendidikan yang rendah dan pengalaman yang sangat minim untuk terlibat dalam urusan publik adalah problem paling mendasar bagi para perempuan desa ini untuk bisa mengembangkan diri. Imaji mendasar tentang perempuan desa yang belum optimal dalam mengungkapkan pendapat di forum yang dihadiri oleh lebih banyak laki-laki masih menempel kuat pada diri laki-laki aparat desa.

"Perempuan terhadap laki-laki: grogi. Masyarakat desa kan masih ortodoks dalam hal keagamaan. Perempuan masih di sektor dapur, belum keluar rumah." (Kepala Desa, desa penelitian di Cirebon, 28 Maret 2019).

Keterlibatan di dalam Musdes ini juga mengindikasikan adanya pergeseran norma sosial yang lebih membuka ruang bagi perempuan. Forum Musdes 2018 memungkinkan perempuan untuk hadir dan berpartisipasi, juga perempuan desa kini memiliki banyak kesempatan untuk beraktivitas di luar ranah domestiknya. Namun begitu, potensi halangan untuk perempuan untuk beraktivitas masih ada. Sebagian laki-laki masih berpendapat bahwa seorang perempuan yang telah menikah bisa mengikuti kegiatan di luar rumah yang positif apabila tidak melupakan kewajiban untuk suaminya. Hal ini pun mengindikasikan kuatnya definisi 'kewajiban' dari sudut pandang laki-laki ketimbang perempuan.

"Selama kegiatan itu positif dan manfaat, kami sebagai kaum Adam...sebagai kepala keluarga sangat mendukung dan setuju selama tidak menyalahi kodratnya sebagai wanita dan selama tidak meninggalkan kewajibannya sebagai wanita yang terutama juga [ber]bakti pada suami...Ya umpamanya ada kegiatan rapat. Waktunya misalnya...jam-jam kerja suami pulang, suami pulang. Saya pulang jam 3 itu [istri] harus sampe di rumah. Ya misalnya rapat melebihi waktu ini ya... yang tadi [saya] sebut gitu. Selama kegiatannya positif, bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga dan masyarakat sangat mendukung." (Bapak Suropto, perangkat desa, desa penelitian di Cirebon, 6 Maret 2019).

Bertambahnya jumlah dan variasi kegiatan untuk perempuan desa pada satu sisi telah membantu mereka tampil lebih percaya diri di hadapan publik. Akan tetapi, kepercayaan diri belum sepenuhnya kuat terutama ketika mereka berada pada satu forum dengan pejabat desa (kepala desa) tanpa kehadiran para pendamping.

“Ya, apa sih ya. Takut ada itu sih, apa sih, kan itu kan [ada staf/pejabat] dari [Dinas] Pertanian, jadi takut ada apa-apa gitu. Karena gini, [kuatir mereka mengatakan]: e bukan mintanya di saya, [tapi] di desa. Takutnya tuh di pikiran saya tuh kalau usul takut salah jalur. Iya, takutnya eh bukan saya, bukan usulan ke sini, gitu takutnya tuh.” (Ibu Hatini, Kader Kespro, desa penelitian di Cirebon, 2 Maret 2019).

Bagi mereka, aktivitas di ruang publik memang aktivitas baru yang penuh tantangan. Sebagian besar perempuan desa masih memerlukan waktu panjang untuk mendapatkan keterampilan dan kepercayaan diri yang kuat. Akan tetapi Musdes tahun 2018 telah memberikan harapan bagi berkembangnya bibit partisipasi perempuan desa. Kesempatan tersebut berhasil mendorong tiga orang Kader Kespro BSA untuk menyampaikan usulan. Usulan ini tidak selalu harus berupa usulan untuk kesehatan reproduksi, tetapi dapat berkaitan dengan aktivitas perempuan. Karena itu di tengah pesimisme dari kalangan laki-laki dan tantangan bagi sebagian besar perempuan desa, Musdes tahun 2018 tetap menghasilkan perubahan penting.

Dalam rapat yang total dihadiri oleh sekitar 60 orang, Ibu Srikandi yang merupakan kader yang paling dikenal dengan ragam aktivitasnya di masyarakat mengawali menyampaikan beberapa usulan. Ia mengajukan BOK (Bantuan Operasional Kegiatan) atau uang transportasi bagi para kader. Bagi Ibu Srikandi, ketiadaan BOK menjadi kendala bagi sebagian besar teman-temannya sesama kader untuk aktif mendekati masyarakat. Ia yang memiliki minat dan empati sangat besar untuk mengunjungi orang sakit dan menularkan pengetahuan kesehatan merasa bahwa BOK akan lebih mudah menggerakkan kader perempuan menjadi lebih proaktif.²⁰ Ibu Srikandi juga mengusulkan tentang perlunya dukungan pemerintah desa yang rutin untuk PMT (Pemberian Makanan Tambahan). Hal ini agar Posyandu dapat lebih menyediakan makanan tambahan yang sehat untuk para pengunjungnya.

Upaya ini pun membuahkan hasil, khususnya untuk usulan mengenai dukungan pemerintah desa untuk PMT. Sebelum pemerintah desa memberikan dukungan, para kader posyandu mengelola dana bersama melalui *kencleng* (iuran suka rela dalam bentuk uang koin) dan membelanjakan hasilnya untuk penyediaan jajanan murah yang bervetsin. Namun saat ini pemerintah desa telah mengalokasikan PMT untuk keperluan posyandu di mana para Kader Kespro BSA dan Kader BSA banyak terlibat.

“Ya buktinya sekarang dalam Posyandu ada kegiatan timbangan balita, lima-enam orang itu ada, dulu itu dua-tiga [orang saja yang hadir]. Nah permasalahannya sekarang di PMT masyarakat itu [suka menyediakan makanan] ciki-ciki [makanan yang mengandung berkadarnya MSG tinggi] yang harga 500 [rupiah], yang harga 1.000 [rupiah] untuk PMT. Itu boro-boro perbaikan gizi, malah buat sakit anak. Lah sekarang kan dengan adanya anggaran PMT, tergantung kadernya, ada yang pakai kadang-kadang bikin bubur kacang, bubur nasi gitu. Minggu depan sih kita pingin ini. Dulu sih ciki, biskuit. Mending lauk setepak, 2-3 biskuit Roma.” (Kepala Desa, desa penelitian di Cirebon, 1 Maret 2019).

Sedangkan upaya untuk mendapatkan dukungan berupa BOK (Bantuan Operasional Kegiatan), usulan ini belum dapat direalisasikan sebagai anggaran khusus. Kepala desa mengatakan bahwa hal ini terganjal oleh ketentuan administrasi penggunaan dana APBDes. Oleh karena itu, yang dapat ia lakukan adalah mempersilahkan para kader mengelola dana yang dialokasikan untuk Posyandu, termasuk dengan sedikit mengalokasikan dana untuk menggiatkan para Kader Posyandu.

“Tahun kemarin ya...ada PMT [Pemberian Makanan Tambahan], terus Posyandu kan Rp100.000,00 satu bulan. Dan kita ada 24 posyandu. Berarti kan sebulan kan berapa, Rp2.400.000,00 dikali dua belas. Nah saya kan apa, silahkan uang itu kelola, dasarnya untuk makanan tambahan. Kita hidup bagaimana? Kita jangan munafik lah, diatur. Karena kan dari seratus ribu per posyandu kan kalau semua saya kasihin kader sedangkan saya tidak boleh. Ke kader harus sepuluh ribuan setiap, kan nggak boleh dianggarkan di APBDes, saya nggak boleh, nggak ada honor. Bagaimana cara? Pakai bahasa paket itu seratus ribu [untuk] satu kegiatan [silahkan] diatur gitu. Yang penting dalam laporan ya harus (sesuai) sasaran ke PMT. Nah situlah kita makanya serba salah. Kalau kita

²⁰ Obrolan dengan Ibu Srikandi selama Februari-Maret 2019.

sesuai [dengan aturan penggunaan APBDes] kasihan [kader]. [Sebab], setiap kader kan tidak ada tunjangan, tidak ada.” (Kepala Desa, desa penelitian di Cirebon, 1 Maret 2019)

Dalam Musdes 2018, Ibu Hatini yang juga merupakan Kader Kaspro mengusulkan pembelian alat musik bersama berupa rebana. Usulan ini memang belum spesifik terkait dengan agenda pembiayaan kesehatan reproduksi. Tetapi, bagi perempuan desa, rebana memiliki makna yang lebih luas dari sekedar alat musik yang biasa dimainkan dalam kegiatan religi. Kegiatan musik rebana adalah fasilitas bagi ruang pertemuan para perempuan desa. Kegiatan ini memfasilitasi para perempuan untuk keluar dari kepenatan aktivitas domestik, bertemu dengan perempuan lain dari desanya untuk belajar mengekspresikan diri melalui musik. Rebana, pada akhirnya memfasilitasi bertambahnya ruang bagi perempuan desa untuk mengenal satu dengan lainnya, bercerita tentang kehidupan sehari-hari, dan juga kesempatan untuk menularkan pengetahuan yang mereka serap dari aktivitas bersama PD ‘Aisyiyah. Pada saat tulisan ini diterbitkan, usulan ini masih dalam proses pertimbangan oleh pihak desa. Namun, Ibu Hatini sendiri mengatakan bahwa hal terpenting baginya adalah ia telah berani mengusulkan sesuatu yang berguna dalam Musdes:

“Iya diterima [usulannya]. [Tapi] nggak penting dapet enggakya sih. Yang penting udah usul aja gitu.” (Ibu Hatini, Kader Kaspro, desa penelitian di Cirebon, 2 Maret 2019).

Hadirnya kesempatan bagi perempuan untuk hadir dalam Musdes merupakan pengalaman baru. Sekalipun pada kesempatan pertama di bulan Desember 2018 ini suara perempuan belum banyak terdengar, tetapi kehadiran mereka serta keberanian mereka untuk mulai mengusulkan sesuatu merupakan investasi jangka panjang bagi perkembangan partisipasi perempuan di desa. Di tengah skeptisisme laki-laki desa sebagaimana ditunjukkan di awal sub-bab ini, beberapa peserta Musdes laki-laki melihat positif keterlibatan perempuan dalam Musdes. Bagi mereka, perempuan terkadang lebih jeli dalam melihat persoalan lingkungan (sampah, kerusakan infrastruktur, kebutuhan kesehatan) walaupun selama ini lebih banyak menyampaikan usulan secara informal (tidak dalam forum rapat).

“Usul banyaklah kalau usul [misalnya] tempat sampah itu banyak, katanya [diperlukan di] jalan-jalan tuh...MCK [fasilitas untuk Mandi, Cuci, Kakus], kadang-kadang kan itu kalau di tempat saya kan banyak yang belum (punya). Kadang-kadang itunya [aktivitas MCK] kan di kali, di sawah gitu... Setiap ketemu juga diomong.” (Bapak Ari, kepala dusun, desa penelitian di Cirebon, 6 Maret 2019).

Karena itu, Musdes yang menghadirkan perempuan desa memberikan kemanfaatan bagi perempuan dan desa secara umum. Musdes tahun 2018 juga menjadi prototipe bagi pelaksanaan Musdes pada tahun-tahun berikutnya. Dalam hal ini keberhasilan kelompok perempuan untuk meminta peluang yang sama untuk musdes berikutnya serta kesediaan pemerintah desa untuk memfasilitasi hal ini merupakan kunci bagi keterlibatan mereka pada rapat publik.

4. Agenda dan Strategi Pendekatan PD ‘Aisyiyah

Bagian ini menguraikan tentang bagaimana agenda kesehatan reproduksi perempuan menjadi isu yang dibawa oleh PD ‘Aisyiyah ke tingkat desa. Bagian ini juga menjelaskan strategi-strategi pendekatan yang dipakai oleh PD ‘Aisyiyah untuk memuluskan jalan pembentukan aksi kolektif perempuan di desa penelitian di Kabupaten Cirebon.

4.1. Agenda Kesehatan Reproduksi

Terdapat dua alasan mengapa kesehatan reproduksi menjadi agenda penting yang dibawa oleh PD ‘Aisyiyah Kabupaten Cirebon. *Pertama*, sebagai organisasi masyarakat keagamaan dengan tipe struktur vertikal multi tingkat, isu ini merupakan isu yang sudah disepakati terlebih dahulu di level tertinggi (Pimpinan Pusat) untuk menjadi agenda bersama hingga pada level terbawah (desa/ranting). *Kedua*, isu ini menjadi penting bagi desa penelitian di Cirebon karena hasil identifikasi awal oleh PD ‘Aisyiyah Kabupaten Cirebon menunjukkan potensi persoalan kesehatan reproduksi perempuan yang cukup serius. Sejak tahun 2014 ketika PD ‘Aisyiyah

Kabupaten Cirebon pertama kali masuk ke desa ini hingga awal tahun 2019, terdapat dua puluh orang dengan indikasi tumor ataupun kanker. Empat di antara mereka meninggal dunia karena kanker leher rahim, kanker payudara, dan kanker getah bening. Sementara itu, beberapa orang lainnya bersedia menjalani operasi tumor pada payudara sebelum berlanjut menjadi masalah yang lebih serius. Temuan-temuan tersebut pun menambah daftar penyakit yang diderita masyarakat desa mulai dari penyakit tidak menular seperti darah tinggi hingga penyakit endemik lama seperti tuberkulosis (TBC) dan kusta.²¹

Struktur Pimpinan Daerah (PD) 'Aisyiyah Kabupaten Cirebon sendiri baru berusia sekitar empat tahun ketika bermitra dengan MAMPU dalam bidang kesehatan reproduksi perempuan dan gizi. Saat mengawali pengembangan organisasi yang terpisah dari PD 'Aisyiyah Kota Cirebon di tahun 2010, PD 'Aisyiyah Kabupaten Cirebon memperoleh bekal organisasi berupa 8 cabang organisasi (level kecamatan) serta 30 ranting organisasi (level desa). Dalam waktu sembilan tahun (2010-2019), organisasi ini bertambah menjadi 15 cabang serta 60 ranting. Hal ini menandakan PD 'Aisyiyah berhasil memperluas jaringannya di masyarakat dalam bentuk penambahan organ-organ kepengurusan hingga dua kali lipat dibandingkan sebelumnya. Hal ini pun mengindikasikan bahwa pengembangan organisasi merupakan target penting dari Pimpinan PD 'Aisyiyah Kabupaten Cirebon selain menjalankan agenda edukasi dan advokasi perempuan di bidang kesehatan reproduksi dan gizi.

Dalam upaya menjalankan agenda ganda tersebut PD 'Aisyiyah Kabupaten Cirebon melakukan beberapa langkah. *Pertama*, membuat penugasan untuk melaksanakan Program MAMPU. Tiga organ utama PD 'Aisyiyah pun menjadi pelaksana program di desa. Mereka adalah Wakil Ketua yang menjalankan peran Koordinator Senior Program, Bendahara yang merangkap sebagai Bendahara Program, serta Sekretaris yang merangkap sebagai Sekretaris Program. Koordinator senior program bekerja lebih pada level menjalin komunikasi dengan aktor kunci (pimpinan pemerintahan) di kabupaten, kecamatan, dan desa. Sementara, dua organ lainnya berfungsi sebagai organisator pemberdayaan perempuan desa. Kedekatan lokasi domisili dengan desa lokasi memungkinkan kehadiran mereka secara intens dalam keseharian aktivitas pemberdayaan. Keberadaan organisator yang merangkap sebagai Ketua Pimpinan Cabang (PC) 'Aisyiyah di Kecamatan Talun juga memungkinkan PD 'Aisyiyah menjalankan prosedur organisasi di level kecamatan.

Kedua, PD 'Aisyiyah membidik wilayah-wilayah yang belum tersentuh oleh CSO maupun program pemberdayaan pemerintah. Wilayah-wilayah tersebut cukup menantang karena merupakan kawasan perdesaan yang secara kultural berafiliasi kepada ormas Nahdlatul Ulama (NU). Sementara, 'Aisyiyah merupakan organisasi kemasyarakatan (ormas) perempuan dari Persyarikatan Muhammadiyah. Pada level akar rumput, pengikut tradisi keagamaan dari dua ormas ini seringkali terlibat dalam situasi yang kurang harmonis. Situasi ini bahkan pernah menyebabkan pengusiran pemerintah dan masyarakat desa kepada PD 'Aisyiyah. Peristiwa yang terjadi pada 2014 di desa lain pada kecamatan yang sama ini menjadi pembelajaran penting. Peristiwa tersebut mendorong PD 'Aisyiyah untuk fokus pada strategi mendekati aktor kunci (kepala desa), menggunakan aktivitas keagamaan sebagai strategi secara hati-hati, dan menunda pembentukan kepengurusan organisasi pada level desa.

4.2. Strategi Pendekatan PD 'Aisyiyah Kabupaten Cirebon

Semenjak berdiri sebagai kepemimpinan yang terpisah dari Pimpinan Daerah (PD) 'Aisyiyah Kota Cirebon pada tahun 2010, PD 'Aisyiyah Kabupaten Cirebon aktif melakukan pendekatan ke pemerintah kabupaten. Hal yang lazim dilakukan oleh 'Aisyiyah pada semua level kepemimpinan ini menunjukkan bahwa upaya memfasilitasi ketersediaan ruang kebijakan demi mengefektifkan aksi kolektif perempuan pada tingkat komunitas merupakan strategi standar organisasi.²² Untuk itu, kemampuan membaca konteks sosial dan politik merupakan modal penting yang harus dikuasai oleh pimpinan pada semua level organisasi untuk dapat

²¹ Wawancara dengan Ibu Srikandi.

²² Wawancara dengan Pimpinan Pusat (PP) 'Aisyiyah tanggal 18 April 2019 di Yogyakarta.

menentukan strategi organisasi dan pemberdayaan secara bersamaan. Hasil pembacaan konteks sosial dan politik ini membawa PD 'Aisyiyah kepada strategi di tingkat kabupaten, yakni pendekatan aktor kunci pemerintahan di tingkat kabupaten, dan juga membawa isu *Sustainable Development Goals (SDGs)* dalam melakukan advokasi. Di tingkat desa, PD 'Aisyiyah melakukan komunikasi yang sangat intens dengan aktor kunci yaitu kepala desa dan memanfaatkan jaringan sosial yang telah sedikit terbentuk di desa.

Pendekatan kepada aktor kunci pemerintahan

PD 'Aisyiyah Kabupaten Cirebon memilih strategi mendekati aktor kunci pemerintah pada level kabupaten untuk dapat mengkonsolidasikan kebijakan yang mendukung kesehatan reproduksi. Hal itu berbuah pada terbitnya sejumlah kebijakan penting, mulai dari kontrak kerjasama antara PD 'Aisyiyah dengan Dinas Kesehatan tentang Program Peningkatan Layanan Kesehatan Reproduksi Perempuan, Surat Edaran Dinas Kesehatan Nomor 553/Dinkes-PK/Sek-I/II/2018 tentang Peningkatan Pelayanan Kesehatan Reproduksi melalui Layanan Pemeriksaan IVA Test dan Periksa Payudara Klinis (Sadanis), dan sejumlah kebijakan lainnya. Keberhasilan dalam mendorong kebijakan tersebut pun berimplikasi pada sejumlah agenda. Misalnya saja, terjalinnya kerjasama dengan salah satu Puskesmas dan laboratorium di kabupaten ini untuk memfasilitasi Tes IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat) di desa. Pada level kinerja berjaringan, PD 'Aisyiyah bersama setidaknya tiga LSM perempuan, yaitu WCC Mawar Balqis, Fatayat NU, dan Fahmina juga berhasil menyodorkan agenda perumusan perda perlindungan perempuan kepada lembaga legislatif. Jaringan LSM perempuan ini memiliki komunikasi intens dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon periode 2014-2019 yang merupakan satu-satunya perempuan dalam jajaran pimpinan dewan. Komunikasi ini membuahkan terbitnya Perda No. 1 tahun 2018 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak.²³

Capaian tersebut menjadi penting di tengah arah kebijakan serta situasi politik kabupaten yang tidak menguntungkan, karena kesehatan reproduksi perempuan bukanlah prioritas kebijakan pemerintah kabupaten. Sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi ketiga di Provinsi Jawa Barat (BPS, 2014a)²⁴, Kabupaten Cirebon masih fokus pada isu kesehatan yang paling dasar yaitu pola hidup bersih dan agenda nasional untuk mengentaskan masalah *stunting*.²⁵ Karena itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon 2014-2019 nyaris tidak mencantumkan agenda kesehatan reproduksi perempuan sebagai prioritas. Dokumen ini hanya memperlihatkan bahwa satu bagian kecil dari isu ini, yaitu pengurangan Angka Kematian Ibu (AKI) sebagai salah satu prioritas di bidang kesehatan.

Pada saat bersamaan, Kabupaten Cirebon menghadapi masalah kepemimpinan dalam pemerintahan yang sangat serius dan berpotensi menghambat pelaksanaan agenda kesehatan maupun agenda lain yang lebih luas. Sekalipun tidak ada catatan pasti tentang jumlah rotasi kepemimpinan kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dan jajarannya, beberapa kalangan²⁶ mengatakan bahwa pergantian kepala OPD sangat sering terjadi, termasuk dalam Dinas Kesehatan. Hal itu tidak saja mengakibatkan hambatan dalam implementasi kebijakan daerah, tetapi juga menghadirkan tantangan bagi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang tengah merintis sinergi dengan pemerintah daerah. Puncak dari situasi ini terjadi tahun 2018 ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan Bupati Cirebon dalam kasus jual-beli jabatan birokrasi.²⁷ Hal ini memperburuk situasi kepemimpinan kabupaten setelah pada tahun sebelumnya (2017) Menteri Dalam Negeri memberhentikan Wakil Bupati Cirebon, juga karena kasus korupsi.²⁸ Dalam situasi politik yang

²³ Wawancara dengan Wakil Ketua DPRD Cirebon, 5 Maret 2019.

²⁴ Pada tahun 2014, jumlah penduduk miskin di kabupaten ini mencapai 44.22 persen dan Indeks Pembangunan Manusia rendah yaitu 65,53 (BPS, 2014a).

²⁵ Pola hidup bersih di antaranya agenda untuk menjadikan kabupaten ini sebagai daerah dengan Open Defecation Free (ODF) atau daerah yang terbebas dari Buang Air Besar sembarangan. Stunting merupakan agenda prioritas Presiden 2014-2019. Keterangan dari seorang pejabat menengah di Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

²⁶ Misalnya beberapa narasumber dari OMS dan Dinas Kesehatan.

²⁷ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181025205904-12-341515/kronologi-tangkap-tangan-bupati-cirebon-dalam-ott-kpk>

²⁸ <https://www.liputan6.com/regional/read/2973054/mendagri-berhentikan-wakil-bupati-cirebon-yang-jadi-buronan>.

demikian, Kabupaten Cirebon dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt. Bupati dan Plt. Wakil Bupati) yang memiliki kewenangan terbatas dalam hal pembuatan kebijakan.

Di tengah situasi tersebut, peluang organisasi masyarakat sipil untuk memanfaatkan kebijakan tidaklah hilang sama sekali. Sebelum kasus korupsi menjeratnya, Bupati Cirebon sempat menerbitkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2019. Pasca pemberhentian bupati, para birokrat menengah di beberapa OPD mengambil alih tindak lanjutnya dengan cara mendorong Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati menerbitkan surat edaran. Hal ini menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memberikan catatan serius terhadap pemanfaatan Dana Desa.²⁹ Karena itu pada awal 2019, Plt. Bupati Cirebon menerbitkan Surat Edaran Bupati No. 141/105/DPMD tentang Evaluasi Raperdes APBDes dan Optimalisasi Dana Desa Tahun 2019. Regulasi ini, walaupun dibuat oleh pemerintah kabupaten untuk keperluan mengendalikan penggunaan Dana Desa, berpotensi mendukung advokasi dan pemberdayaan perempuan. Hal ini karena surat edaran bupati mencantumkan himbauan agar desa membiayai agenda-agenda strategis lokal yang berkaitan dengan kepentingan umum masyarakat, termasuk pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga.³⁰

Isu Sustainable Development Goals (SDGs)

Isu ini menjadi kendaraan bagi PD 'Aisyiyah dalam melakukan advokasi di tingkat kabupaten. *Sustainable Development Goals (SDGs)* merupakan rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan (INFID, 2017). PD 'Aisyiyah Cirebon mengambil peran sebagai salah satu ormas yang mendukung implementasinya pada level lokal. Dalam hal ini aksi untuk mendorong pencapaian SDGs di Cirebon dilandaskan pada Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 050/Kep.137-Bappelitbangda/2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Daerah Kabupaten Cirebon, serta Peraturan Bupati Cirebon No 4 tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2019 tentang RAD SDGs Kabupaten Cirebon.

Dalam menjalankan perannya, PD 'Aisyiyah mengkoordinasi NGOs Mitra MAMPU di Kabupaten Cirebon melalui keaktifannya sebagai tim pelaksana SDGs yang terlibat aktif dalam perumusan RAD SDGs di Kabupaten Cirebon. PD 'Aisyiyah bekerja untuk pencapaian Goal 1 (Tanpa Kemiskinan), Goal 2 (Tanpa Kelaparan), Goal 3 (Kesehatan Layak dan Sejahtera), Goal 5 (Kesetaraan Gender) dan Goal 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi). Sebagai ormas yang membangun akar hingga level terbawah pemerintahan, PD 'Aisyiyah membangun program, salah satunya berupa Program Rumah Gizi 'Aisyiyah. Sebagaimana dijelaskan pada bagian KWT, salah satu wujud dari agenda ini adalah membangun dan mengembangkan Kebun Gizi yang dikelola oleh komunitas, dalam hal ini adalah KWT yang dijalankan sepenuhnya oleh Kader BSA.

Berkaitan dengan agenda SDGs, keterlibatan PD 'Aisyiyah dalam komunitas ini mampu mendukung advokasi di level desa. Desa penelitian ini, sekalipun memiliki banyak penduduk miskin dan berpendidikan rendah, tidak masuk dalam desa percontohan yang mendapatkan pendampingan dari kabupaten. Karena itu para perempuan kader 'Aisyiyah yang selama beberapa tahun terakhir telah aktif dalam aksi kolektif untuk kesehatan reproduksi pun tidak mendapatkan rekognisi di level kabupaten. Keterlibatan PD 'Aisyiyah dalam komunitas SDGs kabupaten mampu membuka jalan untuk ini. Melalui grup Whatsapp Pronangkis (Program Penanggulangan Kemiskinan) yang di dalamnya terdapat pula jejaring pemerintah (kepala-kepala dinas) dan

²⁹ Antara lain birokrat menengah di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda). Wawancara dengan Kepala Bidang Pemerintahan DPMD, 21 Februari 2019.

³⁰ Agenda strategis lain yang dicantumkan oleh surat edaran ini adalah: pemerataan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif; dukungan pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni; penyelenggaraan Posyandu; pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah desa/permukiman; dan pengelolaan perpustakaan milik desa.

organisasi masyarakat sipil termasuk ormas 'Aisyiyah, PD 'Aisyiyah aktif menyampaikan upaya yang dilakukan, dan memanfaatkan kanal tersebut untuk memfasilitasi penyelesaian masalah yang dihadapi di komunitas, seperti pengurusan jaminan sosial bagi pasien paliatif dampungannya. Melalui kanal ini pula, rekognisi untuk para kader perempuan desa mulai diupayakan. Hal ini menjadi jalan bagi kepesertaan Ibu Srikandi pada lomba di level kabupaten yang mengantarkannya pada prestasi di level tersebut pada akhir tahun 2019 (lihat penjelasan di bawah).

Penggunaan pendekatan ke tokoh agama dan pemanfaatan jaringan sosial

Sebagai organisasi masyarakat yang berbasis keagamaan, pendekatan ke tokoh agama menjadi strategi khas 'Aisyiyah. Karena itu pula 'Aisyiyah di semua level organisasi menggunakan pendekatan yang progresif namun tetap dikaitkan dengan ajaran agama, termasuk untuk menjalankan edukasi dan advokasi di kesehatan reproduksi perempuan, malnutrisi pada anak, pengasuhan anak dan juga hak perempuan atas tubuhnya.

Namun demikian, dalam konteks masyarakat desa Cirebon, pendekatan agama digunakan secara hati-hati untuk tidak menyentuh hal-hal sensitif di masyarakat yang menjalankan tradisi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU). Pendekatan agama secara khusus langsung dikaitkan dengan isu kesehatan reproduksi, setelah pendekatan yang lebih umum dirintis termasuk oleh kader-kader dari Persyarikatan Muhammadiyah jauh sebelum tahun 2014. Sekitar dua puluh tahun lalu, para aktivis muda Muhammadiyah, termasuk perempuan, melakukan bakti sosial, penyaluran bantuan untuk anak yatim sekaligus inisiasi kegiatan ekonomi dalam tahap sangat terbatas.

"Awalnya saya menyantuni beberapa anak yatim. Tadinya cuma 9 [anak]. Tahun berikutnya bisa sampai 18 [anak], tahun berikutnya sampai 40 [anak]. Saya udah ga sanggup kan... Setelah saya lihat dari tahun ke tahun kenapa banyak anak yatim itu karena apa? [Karena] bapaknya dari SD itu udah kerja bangunan di Jakarta. Di mana kalau dia tidak lembur dia gak bisa ngirim [uang ke] keluarga... Nah orang kerja dengan keras seperti itu tuh, dengan semen, dengan pasir, dengan apa, terus-terusan [maka] itu banyak kasus TB [tuberkulosis]... Kita itu ada tiga kelompok di blok [dusun] desa sini. Dan kebetulan saya pertama kali dateng ke sini itu 20 tahun yang lalu. Itu saya kenal sama aparat desa, namanya Abah Dadang itu, sama Abah Sarwa, dua-duanya udah abah-abah [bapak-bapak], sama-sama angon kambing tuh. Angon wedhus [menggembala kambing] di sini gitu kan... Jadi saya nganggap orang tua saya di sini... tidak hanya melulu maro³¹... Itu awal saya mengenal orang [desa]." (Ketua Pimpinan Cabang (PC) 'Aisyiyah di tingkat kecamatan, Cirebon, 4 Maret 2019).

Walaupun aktivitas tersebut belum dilakukan atas nama 'Aisyiyah, pengetahuan tentang desa terakumulasi sebagai pengetahuan untuk PD maupun PC 'Aisyiyah seiring dengan kedudukan sang aktivis di dua institusi tersebut. Hal ini juga berkontribusi terhadap kemudahan relasi di kemudian hari, yang membantu proses penguatan aksi kolektif perempuan di tingkat desa. Untuk selanjutnya, setelah aktivitas edukasi dan advokasi kesehatan reproduksi perempuan melalui kelompok-kelompok perempuan cukup berhasil, pendekatan agama dapat dilakukan untuk memberikan kemanfaatan sosial yang lebih luas. Pada tahun 2019 PD 'Aisyiyah menyelenggarakan pelatihan perawatan jenazah oleh perempuan untuk perempuan. Hal ini mengisi kekosongan tokoh agama perempuan yang dapat memimpin prosesi tersebut.

5. Tantangan Ke Depan

Di tengah semangat aksi kolektif, perempuan desa menghadapi dua tantangan untuk melanjutkan agenda positif ini. Tantangan tersebut datang dari pihak lain maupun dari diri mereka sendiri. Di antara tantangan yang berasal dari pihak lain adalah sulitnya mendapatkan pengakuan, khususnya dari tokoh laki-laki desa. Seorang tokoh masyarakat yang duduk dalam sejumlah kepengurusan desa melontarkan kritik terhadap aksi kolektif yang telah terbentuk. Ia mengatakan bahwa keaktifan para kader telah memunculkan kecemburuan di masyarakat. Hal ini karena kegiatan-kegiatan perempuan yang marak sejak PD 'Aisyiyah hadir hanya diikuti oleh mereka yang tergabung sebagai Kader Kespro. Adapun para istri RT dan istri Kadus tidak hadir karena

³¹ Sistem bagi hasil di mana pemilik modal dan penggarap sama-sama memperoleh keuntungan 50 persen.

merasa tidak diundang dalam kegiatan-kegiatan tersebut, takut merecoki, dan canggung karena memiliki pendidikan yang rendah.³²

Pandangan skeptis ini juga diikuti dengan keraguan terhadap kapasitas dan komitmen para kader. Tokoh ini mengatakan bahwa para kader jarang menularkan pengetahuan kepada perempuan lain di desanya karena kendala mobilitas (sebagian besar tidak dapat mengendarai sepeda motor) serta perasaan malu untuk menyampaikan sekalipun keinginannya besar dan tidak mendapatkan halangan dari para suami. Bagi tokoh laki-laki ini, keberadaan kader yang mendapatkan pendampingan dari PD 'Aisyiyah juga bukanlah hal yang istimewa. Ia mengklaim bahwa sebelum edukasi kepada perempuan desa melalui aksi kolektif, ia telah terlebih dahulu mendidik ibu-ibu lain untuk berani mengembangkan diri. Ibu-ibu ini adalah mereka yang menyekolahkan anaknya di sarana pendidikan dini yang didirikannya. Selanjutnya, ia pun menyoroti tentang isu yang diusulkan saat Musdes bahwa kader tidak memperoleh bayaran (honorarium). Menurutnya isu ini hanyalah komoditas yang 'dijual' padahal hal itu lazim dalam kerja-kerja sosial. Lebih lanjut, tokoh ini juga mengkritisi tentang peran perempuan desa dibalik lahirnya Perdes Kespro Nomor 7/2017. Baginya, keberadaan perdes bukanlah hal yang aneh. Sebab, perdes tersebut memang sudah waktunya ada, meskipun ia tidak menampik bahwa terbitnya perdes merupakan sebuah kemajuan.³³

Selanjutnya, aksi kolektif perempuan juga berpotensi menghadapi tantangan besar di masa mendatang, khususnya bila kepala desa berganti dengan yang baru. Hal ini karena kader, khususnya dari kelompok Kader Kespro BSA yang diproyeksikan sebagai penggerak dari aksi kolektif merupakan kader desa yang direkomendasikan oleh kepala desa. Pengalaman ini pernah terjadi di desa lain di Kecamatan Talun sehingga menyebabkan berhentinya program pendampingan dan berhentinya aksi kolektif perempuan yang tengah dirintis.

"Nah ini jeleknya di sini kadang tidak semua kuwu [kepala desa] itu mendukung. Kadang dengan pergantian kepala desa seluruh kader juga diganti. Kita kena imbasnya banyak. Karena tim suksesnya. Berpihak gitu, kepada kuwu gitu, jadi diganti. Jadi imbas sampai di desa juga tim sukses itu memengaruhi gitu. Kalau kadernya bukannya ininya dia, ya udah. Nah itu yang dirasakan di beberapa desa. Yang sekarang ya desa dampingan kita [desa lain] itu habis semua. Karena waktu itu kadernya itu di kubu yang lain, gitu." (Sekretaris PD 'Aisyiyah, Cirebon, 21 Februari 2019)

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa momentum pemilihan kepala desa yang sarat dengan politik menggalang dukungan merupakan tantangan besar yang dapat berakibat pada berhentinya aksi kolektif. Potensi permasalahan ini pun dipahami sepenuhnya oleh para Kader Kespro BSA. Namun, mereka tidak larut dalam kekhawatiran tersebut. Mereka tetap berkumpul rutin setidaknya satu pekan sekali untuk mengerjakan agenda KWT bersama dan menjalankan agenda-agenda BSA lainnya.³⁴

Apa yang mereka lakukan merupakan langkah penting untuk memelihara eksistensi aksi kolektif perempuan. Mereka berupaya mengisi peluang yang hadir setelah KWT diakui secara formal oleh kepala desa. Meskipun dokumen formal berupa berita acara pembentukan tidak dapat menjamin keberlangsungan aksi mereka di masa yang akan datang, namun pencantuman nama kader pada struktur KWT cukup memberikan energi untuk memupuk kemampuan mereka. Sebagaimana disebutkan dalam bagian lain di atas, dokumen ini mempermudah akses bantuan dari pemerintah desa maupun Dinas Pertanian guna mendukung aktivitas

³² Kritik disampaikan oleh Bapak Ahmad kepada peneliti saat perbincangan tanggal 3 Maret 2019, sebagaimana tercatat dalam Buku Harian Peneliti. Kritik serupa juga pernah dilontarkan oleh perempuan anggota masyarakat non-Kader BSA dalam kesempatan terpisah, sebagaimana tercatat dalam Buku Harian Peneliti.

³³ Perbincangan antara penulis dengan Bapak Ahmad pada 3 Maret 2019, sebagaimana tercatat dalam Buku Harian Peneliti.

³⁴ Obrolan dengan Ibu Nurjanah, 24 Februari 2019 pada saat para kader berkumpul untuk merawat kebun sayur. Pertemuan ini rutin dilakukan setidaknya satu pekan sekali yang ditutup dengan agenda keakraban di mana mereka membawa makanan masing-masing untuk sarapan bersama sambil berbincang di pinggir sawah.

mereka. Eksistensi secara informal dan formal yang intens inilah yang memberikan peluang untuk eksistensi mereka di waktu yang akan datang.

Bila hal-hal di atas memperlihatkan tantangan yang terdapat dari luar komunitas, tantangan dari dalam komunitas juga memerlukan perhatian. Sebagaimana beberapa telah disinggung oleh tokoh laki-laki di atas, masalah kepercayaan diri perempuan merupakan masalah mendasar yang selama ini terus mendapatkan perhatian. Ketergantungan kepada pendamping secara psikis belum sepenuhnya dapat diatasi. Terutama, ketika mereka terlibat dalam rapat yang dihadiri aparat desa laki-laki, ataupun ketika harus menyusun dokumen yang diperlukan.

“Ya udah mulai terbuka cuma kadang masih agak malu-malu kalau nyampein di depan bapak–bapak. Makanya kalau didampingi kita-kita baru mulai pada berani ya kitanya duduk aja di situ di belakang. Kita buka sedikit kita sentil sedikit, langsung ngomong. Ini apa ini yang dibutuhin, ya sok [ayo] bikin anggarannya jangan omongannya aja. Kadang ya sok [ayo] ibu masa saya yang bikinin. Ayo bu belajar kan kemarin udah diajarin membuat laporan seperti apa.” (Ketua Koordinator Program MAMPU-Aisyiyah, Cirebon, 21 Februari 2019).

Permasalahan tersebut memerlukan ketelatenan, intensitas aktivitas yang tinggi, serta contoh-contoh positif dari lingkungan terdekat. Menjelang akhir tahun 2019, atau setelah Ibu Srikandi terpilih sebagai satu dari perempuan akar rumput yang bertemu presiden di Istana Negara, ia melanjutkan upaya membuktikan kapasitas dirinya sebagai kader. Sebagaimana disebutkan, dengan fasilitasi PD ‘Aisyiyah dengan jaringan SDGs di kabupaten, Ibu Srikandi dapat mengikuti lomba pada level ini dan berhasil meraih Juara II dalam Lomba Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Berprestasi Tahun 2019. Hal ini menambah catatan capaian kader secara individual yang berpotensi menambah semangat untuk kelompok perempuan di desa Kecamatan Talun.

Adapun tantangan lain yang juga penting untuk mendapatkan perhatian adalah kapasitas dan komitmen kader yang belum merata. Saat ini, Kader Kespro BSA menunjukkan kesiapan yang lebih dalam kedua hal tersebut. Peran mereka sebagai penggerak komunitas menjadikan mereka memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk dapat berkomunikasi dan meminta dukungan dari PD ‘Aisyiyah sebagai pendamping. Jumlah mereka yang lebih sedikit, serta pengalaman mereka sebelumnya sebagai kader desa (PKK dan Posyandu) juga menjadi tabungan bagi kesiapan mereka untuk terlibat dalam aksi kolektif ini. Sementara itu, para Kader BSA masih menghadapi persoalan yang lebih mendasar baik dalam hal kepercayaan diri (karena sebelumnya tidak pernah terlibat dalam aktivitas kader), juga persoalan rumah tangga yang belum selesai sepenuhnya.³⁵

Salah satu upaya yang tampak dilakukan untuk meminimalkan perkembangan gap yang lebih jauh di masa yang akan datang muncul dari pendamping. PP ‘Aisyiyah selama beberapa waktu terakhir telah meleburkan beberapa konsepsi kader. Di antaranya, dengan menghapuskan istilah motivator (koordinator kader), dan menjadikan seluruh lapis pengkaderan di desa dalam satu istilah yaitu kader.³⁶ Fokus pada istilah Kader BSA dalam forum-forum di luar desa juga tampak digunakan untuk mengangkat nama ini, termasuk saat PP ‘Aisyiyah mengirimkan Ibu Srikandi sebagai perwakilan ‘Aisyiyah dalam pertemuan dengan presiden dan momentum lainnya.³⁷

Penutup

Perempuan desa merupakan salah satu kelompok paling rentan mengalami persoalan kompleks yang diakibatkan oleh permasalahan kesehatan reproduksi. Kemiskinan, keterbatasan pengetahuan dan kapasitas, ketundukan pada kultur patriarkis, serta ketiadaan pengalaman advokasi merupakan penyebab umum dari

³⁵ Indikasi ini sebagaimana tampak pada kasus Ibu Sadiyah, anggota BSA yang mengaku tidak lagi aktif dalam pertemuan-pertemuan BSA. Dugaan mengenai relasi dengan suami yang menjadi salah satu penghalang keaktifannya dalam BSA menjadi catatan observasi yang dituangkan dalam Buku Harian Peneliti.

³⁶ Perbincangan dengan perwakilan dari PP ‘Aisyiyah di Jakarta, 28 Oktober 2019, sebagaimana dalam catatan penulis.

³⁷ Misalnya dalam ulasan pada media online terhadap sosok kader: <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/19/10/16/pzgh8i313-kisah-relawan-balai-sakinah-aisyiyah-cegah-kanker>.

lemahnya kemampuan mereka memahami isu-isu kesehatan reproduksi dan menegosiasikan dukungan untuk memperoleh hak atas kesehatan reproduksi. Karena itu upaya mengkonsolidasikan mereka dalam satu aksi bersama menghadapi tantangan tersendiri. Dalam situasi yang demikian, dukungan untuk mengkondisikan situasi politik menjadi penting. Situasi politik yang dimaksud adalah terbangunnya jaringan dan komunikasi politik yang baik antara pendamping dengan pemerintah pada level kabupaten hingga desa. Komunikasi politik ini menjadi modal penting bagi inisiasi kebijakan payung yang dapat memfasilitasi aksi kolektif perempuan desa.

Upaya membangun komunikasi politik ini pun dijalankan oleh Pimpinan Daerah (PD) 'Aisyiyah Kabupaten Cirebon dalam upayanya mengawal agenda membangun aksi kolektif perempuan terkait isu kesehatan reproduksi. Pada tingkat kabupaten, organisasi ini melakukan pendekatan kepada pemerintah kabupaten hingga terbitnya beberapa kebijakan untuk kesehatan reproduksi. Kebijakan ini dilanjutkan dengan cara merajut peluang kebijakan di level Puskesmas dan kecamatan sebelum pada akhirnya pemerintah desa, yang terwujud dengan diterbitkannya Perdes No. 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kesehatan Reproduksi Perempuan, yang memungkinkan pengalokasian Dana Desa untuk agenda kesehatan reproduksi perempuan. Seluruh upaya ini dilakukan dengan mendekati aktor kunci untuk mengefisienkan lobi kebijakan. Terbangunnya situasi politik yang kondusif di tingkat kabupaten membantu kerja PD 'Aisyiyah di tingkat desa. Selain itu, struktur organisasi PD 'Aisyiyah yang vertikal memungkinkan adanya fasilitasi sumber daya, seperti pendampingan kader dan tenaga ahli, untuk melancarkan agenda advokasi di tingkat desa.

Sementara itu pada level desa, strategi untuk membentuk dan mengkonsolidasikan aksi perempuan juga dilakukan melalui beberapa cara. Pendekatan kepada aktor politik terkuat yaitu kepala desa merupakan strategi kunci untuk mendapatkan penerimaan utuh dari perempuan dan masyarakat desa. Tidak hanya itu strategi ini menjadi krusial karena meletakkan dasar kepercayaan terhadap organisasi, kelompok perempuan, dan segala aktivitasnya sehingga memungkinkan diraihinya sumber daya desa yang penting untuk advokasi. Pada level akar rumput, pengorganisasian perempuan menjadi cara mendasar untuk menghadirkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Pengorganisasian ini juga menjadi sarana mengenalkan cara berorganisasi serta melakukan aksi kolektif. Buah dari kegiatan ini antara lain dapat dilihat dari keterlibatan perempuan desa dalam sejumlah aktivitas seperti keaktifan dalam forum-forum BSA, penyusunan raperdes, pengelolaan KWT, serta keterlibatan dalam Musdes.

Upaya keras selama lima tahun kegiatan pun membuahkan keberhasilan. Perempuan desa, khususnya yang tergabung dalam kelompok Kader Kespro BSA—menunjukkan perkembangan dari perempuan pemalu, tidak percaya diri, dan pasif dalam urusan publik di desa menjadi perempuan yang lebih aktif. Perkembangan ini diperlukan baik pada level peningkatan kapasitas pribadi, kemampuan untuk memberdayakan sesama perempuan desa dan mensosialisasikan aspek-aspek penting dalam kesehatan reproduksi kepada perempuan desa secara umum, sekaligus kemampuan untuk memperjuangkan kebijakan yang mendukung peningkatan kesehatan reproduksi perempuan. Sementara itu Kader BSA yang baru pertama kalinya mengenal kegiatan di luar ranah domestik juga mendapatkan sejumlah keuntungan, antara lain: pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, mendapatkan advokasi layanan dasar, serta pengalaman baru untuk berorganisasi. Di tengah capaian tersebut, perubahan yang terjadi masih bersifat inkremental di mana norma sosial yang menempatkan perempuan sebagai objek struktur kuasa belum luruh sepenuhnya. Tumbuhnya kesadaran masyarakat desa mengenai pentingnya kesehatan reproduksi pun berubah baru secara perlahan, dan masih ada resistensi terkait aksi kolektif yang dilakukan perempuan desa. Perempuan desa masih memerlukan dukungan dan pendampingan intens baik dari PD 'Aisyiyah ataupun pemerintah desa dalam melakukan advokasi mereka. Pemanfaatan jaringan sosial dan pendekatan ke tokoh kunci di pemerintah memegang kunci penting untuk memastikan keberlanjutan agenda kesehatan reproduksi perempuan di desa ini.

Bibliografi

BPS, 2014. Kabupaten Cirebon Dalam Angka.

INFID, 2017. Sustainable Development Goals, diakses 14 Juli 2020: <<https://www.sdg2030indonesia.org/>>.

Kementerian Kesehatan, 2016. Permenkes RI No 44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas.

Pemerintah Desa, 2017. Perdes No. 07 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kesehatan Reproduksi, Pemerintah Desa Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.

Pemerintah Desa, 2018. Dokumen Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) tahun 2018 Pemerintah Desa Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.

Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, 2014. Buku Saku Kader.